



KATA PENGANTAR

Dengan berkat lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir.

Untuk memenuhi hal tersebut diatas, Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu kepada analisis kondisi dan potensi Dinas Sosial Daerah serta hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ini, kami ucapkan terima kasih.

Sipirok, 5 Desember 2018
KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

dto

Drs. NURDIN PANE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620518 198203 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	53
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2019	67
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	82
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	83
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	83
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	93
3.3 Program dan Kegiatan	94
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	118
BAB V PENUTUP	132
LAMPIRAN	133



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1.1 Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Daerah	19
Tabel 2.1.2 Pengukuran Kinerja Program Dinas Sosial Daerah	20
Tabel 2.1.3 Rekapitulasi Evaluasi dan pencapaian hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah	22
Tabel 2.2.1 Panti Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan	33
Tabel 2.2.2 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	34
Tabel 2.2.3 Laju Pertumbuhan PMKS	34
Tabel 2.2.4 Rekapitulasi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	35
Tabel 2.2.5 Daftar TKSK, Pendamping PKH, Pendamping Aslut, Pendamping ASODK Berat, dan Peksos	37
Tabel 2.2.6 Daftar Karang Taruna Menurut Kecamatan	43
Tabel 2.2.7 Daftar Penerima Bantuan ASODK Berat, Aslut dan Penyakit Kejiwaan	44
Tabel 2.2.8 Indikator Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan	45
Tabel 2.2.9 Daftar BDT Kesejahteraan Sosial, KKS, PBI dan Dapodik	46
Table 2.2.10 Jumlah Peserta BPJS di Kabupaten Tapanuli Selatan	48
Tabel 2.2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Daerah	50
Tabel 2.3.1 Daftar Pegawai dan THL, Status, Serta Jabatan	59
Tabel 2.3.2 Jumlah ASN yang Terisi	61
Tabel 2.3.3 Daftar Barang Inventaris Dinas Sosial Daerah	62



Tabel 2.3.4	Daftar Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Struktural	64
Tabel 2.4.1	Review Terhadap Rencana Strategis OPD	68
Tabel 3.1.1	Pembagian Kewenangan Bidang Sosial	90
Tabel 3.3.1	Tujuan, Sasaran Program Kegiatan Tahun 2019	98
Tabel 3.3.2	Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	103
Tabel 3.3.3	Indikator Kinerja Utama	117



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sumber Dana APBN Tahun 2018	134
Lampiran 2. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018	137
Lampiran 3. Usulan Program Kegiatan Sumber Dana APBN Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 Melalui Aplikasi Simlaras	143
Lampiran 4. Usulan Program Kegiatan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 Melalui Aplikasi Simlaras	147
Lampiran 5. KUA-PPAS OPD Tahun 2019 Melalui Aplikasi E-Planning	150
Lampiran 6 Rancangan RKA Tahun 2019 Melalui Aplikasi Sitarida	157
Lampiran 7. Rekapitulasi Usulan Program Kegiatan Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019	161



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Daerah adalah dokumen resmi perencanaan tahunan Dinas Sosial Daerah memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang memiliki fungsi sangat penting dalam sistem perencanaan daerah disusun didasarkan atas Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2019 dilakukan Renja Dinas Sosial Daerah Tahun 2019. Adapun alasan yang mendasar dilakukan Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Tahun 2019 hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Sosial daerah Tahun 2016, 2017, dan kondisi triwulan III pada tahun 2018, dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Rumusan Program dan Kegiatan di dalam Renja ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah kami sepakati bersama sesuai tugas fungsi kewenangan Dinas Sosial Daerah dengan mempertimbangkan pagu indikatif;
- b. Adanya penetapan program kegiatan, target kinerja, dan kelompok sasaran;
- c. Rencana Kerja Tahun 2019 berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Daerah 2016-2021;
- d. Renja ini disusun atas dasar Renstra Dinas Sosial Daerah Tahun 2016-2021 yang telah memasuki Tahap IV dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun



- 2019 yang mekanisme dan tata cara penyusunannya berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan dokumen Perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Daerah dengan dorongan serta peran aktif masyarakat untuk tahun 2019.

Rencana Kerja ini disusun untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi bidang sosial yang akan dicapai di tahun 2019. Renja juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan telah memberikan warna dan kontribusi secara nyata dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui upaya penanganan untuk meminimalisir menambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pembangunan kesejahteraan sosial ini juga sebagai upaya dalam penerapan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Pembangunan berkelanjutan ini merupakan



agenda pembangunan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep pembangunan berkelanjutan ini diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Adapun pembangunan kesejahteraan sosial dikategorikan dalam pilar pembangunan sosial yang memiliki tujuan antara lain tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; pendidikan berkualitas; dan kesetaraan gender.

Untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam setiap langkah/kegiatan operasi organisasi. Perencanaan mengarahkan organisasi bergerak sesuai dengan arah dan tujuan yang dikehendaki oleh organisasi. Selain dari pada itu perencanaan juga menjadi pedoman untuk keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu perencanaan harus disusun secara cermat dengan memperhatikan situasi kondisi yang berkembang saat ini dan perkiraan kondisi yang akan datang sehingga perencanaan tidak saja mampu menjawab permasalahan saat ini akan tetapi juga mampu menjawab permasalahan ke depan.

Dalam kehidupan organisasi bernegara, perencanaan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.



Selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya diperbuat Rencana Kerja setiap tahun sebagai arah untuk melaksanakan kegiatan dengan target yang akan dicapai dengan memperhatikan kondisi Sumber daya yang dimiliki untuk dapat dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja dengan kewenangan otonomi daerah yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial, berbagai masalah dan tantangan dalam pembangunan telah berkembang semakin berat dan kompleks dan kadang-kadang tidak terduga. Dalam upaya menanggulangi masalah Sosial terutama warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dalam menghadapi tantangan dimaksud, juga telah ditata kembali organisasi dan sistem kerjanya. Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan di daerah sangat berbeda, ini ditentukan oleh hal-hal yang menjadi karakteristik daerah tersebut. Perbedaan selalu ada pada setiap



daerah baik perbedaan kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya alam (dalam hal ini potensi daerah). Perbedaan ini menuntut Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki pertimbangan tersendiri dalam menyusun rencana pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Proses penyusunan Renja ini dimulai dengan usulan dari setiap bidang dan juga dari Sekretariat Dinas, selanjutnya dilakukan analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja pada triwulan III serta mengacu pada Renstra Dinas Sosial Daerah yang didasarkan pada penelaahan RKPD Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Untuk Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
30. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
31. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;



32. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
33. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 668);
34. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arahan dan sekaligus acuan bagi Dinas Sosial Daerah dalam melaksanakan tugas tahunan mewujudkan visi misi lima tahun ke depan;
- b. Landasan kebijakan pembangunan selama satu tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban pelaksanaan selama satu tahun.

Adapun tujuan rencana kerja tahun 2019 adalah :

1. Memaksimalkan dan melaksanakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai 01 Januari 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2019 yang menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Sosial Daerah sehingga dapat lebih terarah dan terukur, tepat waktu, bermutu dan tepat sasaran.



1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Tahun 2016-2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Daerah) yang merupakan kerangka pembangunan strategis Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode 2016-2021 dengan muatan visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

a. Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025, yakni :

“Tapanuli Selatan Yang Maju, Adil Berlandaskan Agama dan Adat Budaya”

Berdasarkan kondisi Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang ini, peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi, maka pasangan H. Syahrul M. Pasaribu, SH (Bupati) dan H. Ir. Aswin Efendi Siregar, MM (Wakil Bupati) membuat visi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

“Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul, Sehat, Cerdas, Sejahtera, serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”.



b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan terpilih, maka dirumuskanlah misi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ);
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitasi sosial dan umum masyarakat;
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa;
5. Meningkatkan standar hidup layak, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).



- Sasaran : 1. Terwujudnya perilaku masyarakat yang religius dan berbudaya serta rukun antar suku dan umat beragama;
2. Meningkatnya angka partisipasi dan lama bersekolah, kualitas lulusan pendidikan dasar dan kurangnya angka putus sekolah;
3. Meningkatnya angka usia harapan hidup, angka kelangsungan hidup bayi, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan gizi buruk serta terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
4. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kompetensi dan daya saing masyarakat.
- Tujuan 2 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan.
- Sasaran : 1. Meningkatnya pendapatan produktivitas masyarakat;
2. Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis garis kemiskinan dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
3. Terjaminnya ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan strategis lainnya dengan harga yang terjangkau masyarakat;
4. Terjaminnya pemasaran produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan industri.
- Tujuan 3 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.



- Sasaran : 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perkantoran, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum dan pelayanan umum lainnya;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat serta tertatanya kawasan pemukiman kumuh;
3. Terselenggaranya penataan ruang daerah;
4. Terwujudnya pengendalian lingkungan hidup serta meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana.
- Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintah daerah dan desa yang baik, bersih dan berwibawa
- Sasaran : 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan Standar Pelayanan Umum;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa;
4. Terwujudnya percepatan pembangunan antar sektor, wilayah dan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara serta meningkatnya kehidupan berdemokrasi.
- Tujuan 5 : Terwujudnya kualitas standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Sasaran : 1. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat;
2. Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya;
3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016, dan uraian tugas dan fungsi serta tata cara kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2016.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkaitan dengan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu :

1. Misi 2 : Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan.

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan.

Sasaran :
 - a. Meningkatkan pendapatan produktivitas masyarakat;
 - b. Meningkatkan jumlah penduduk di atas garis kemiskinan dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
 - c. Terjaminnya ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan strategis lainnya dengan harga yang terjangkau masyarakat;
 - d. Terjaminnya pemasaran produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan, dan industri.



2. Misi 5 : Meningkatnya standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Tujuan : Terwujudnya kualitas standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran : a. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat;

b. Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya.

Untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diatas dan yang berkaitan dengan kewenangan, tugas dan fungsi maka Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki misi dan tujuan sebagai berikut :

Misi Dinas Sosial Daerah adalah :

1. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat.

Tujuan Dinas Sosial Daerah adalah :

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Dinas Sosial Daerah;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, kelompok, dan komunitas masyarakat.

Adapun yang menjadi prioritas untuk mencapai tujuan Dinas Sosial daerah adalah :

1. Peningkatan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pelayanan publik;
2. Pemenuhan kebutuhan standar hidup layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani untuk meningkatkan kualitas hidupnya.



Sasaran organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah adalah :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
2. Terwujudnya standar hidup layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Meningkatnya kualitas hidup layak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani.

Strategi yang dilakukan untuk memenuhi sasaran Dinas Sosial Daerah adalah :

1. Mendorong dan memfasilitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
2. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah;
3. Menurunkan angka penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial;
4. Menumbuhkembangkan lembaga dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sedangkan arah kebijakan yang dilakukan untuk memperkuat strategi Dinas Sosial Daerah adalah :

1. Memberlakukan kebijakan-kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
2. Memberlakukan kebijakan-kebijakan teknis yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat;
3. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial;
4. Mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Daerah didasarkan pada sasaran sebagai berikut :



Tabel 2.1.1
Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Daerah Tahun 2018

Misi	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi TW III 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah	Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)	66,67%	34,74%
Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat	a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93,29%	98,28%
	b. Sarana sosial panti asuhan (unit)	4 Unit	4 Unit
	c. Sarana sosial panti jompo (unit)	4 Unit	4 Unit
	d. Persentase penanganan PMKS (%)	54%	56,93%

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Daerah tahun 2017 hingga Triwulan III Tahun 2018 merupakan salah satu bagian dalam tahapan penyusunan rancangan rencana kerja tahun 2019. Bahan evaluasi yang dilakukan berupa pelaksanaan program kegiatan di tahun 2017 dan Triwulan III Tahun 2018, seperti sarana sosial, jumlah PMKS yang menerima bantuan, laju pertumbuhan PMKS, jumlah penduduk miskin, serta realisasi anggaran.



Tabel 2.1.2
Pengukuran Kinerja Program Dinas Sosial Daerah Tahun 2018

Misi	Program	Indikator	Target	Realisasi TW III 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah		Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)	65%	34,74%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	50,93%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya peningkatan prasarana dan sarana aparatur	100%	21,34%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	20 Orang	0 Orang
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya kewajiban pelaporan kinerja SKPD	100%	66,67%
Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat		a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93,29%	98,28%
		b. Sarana sosial panti asuhan (unit)	4 Unit	4 Unit
		c. Sarana sosial panti jompo (unit)	4 Unit	4 Unit
		d. Persentase penanganan PMKS (%)	54%	56,93%
	Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pesentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93,29%	98,28%
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)	37%	0%
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penanganan para penyandang cacat dan trauma (%)	24%	0%



Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Sarana sosial panti asuhan (Unit) Sarana sosial panti jompo (Unit)	4 Unit 4 Unit	4 Unit 4 Unit
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)	24%	15,38%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah karang taruna yang telah dibina	3 Karang Taruna	0 Karang Taruna

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.3 berikut ini :



Tabel 2.1.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah dan
Pencapaian Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2018

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Triwulan III Tahun 2018		Catatan
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW IIITahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+TW III)	11=(10/4)	12
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	0	100	96.75	96.75	100	73.84	73.84	
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat - menyurat SKPD (Benda Pos)	750	0	150	150	100	165	150	20.00	
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (Bulan)	60	0	12	12	100	12	21	35.00	
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional, roda 4 : 3 unit dan roda 2 : 1 unit (Bulan)	60	0	12	12	100	12	21	35.00	



1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kantor dalam kondisi baik (Bulan)	12	0	12	12	100	0	12	100.00	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	60	0	12	12	100	12	21	35.00	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (Bulan)	60	0	12	12	100	12	21	35.00	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat-alat listrik (Bulan)	60	0	12	12	100	12	21	35.00	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (Bulan)	60	0	12	12	100	12	21	35.00	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar kantor/majalah dinas (Bulan)	60	0	12	12	100	12	21	35.00	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor (Kotak)	5861	0	1209	1209	100	300	1434	24.47	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH)	1150	0	300	300	100	233	438	38.09	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (OH)	1320	0	420	420	100	317	604	45.76	



1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 6 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang, pembantu pengurus barang pengguna 1 orang (%)	100	0	100	95.99	95.99	100	80.93	80.93
1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100	0	100	92.64	92.64	100	56.99	56.99
1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	14	0	3	3	100	1	3	21.43
1	0	0	1	0	0	0	0	0	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	11	0	0	0	0	3	1	9.09
1	0	0	1	0	0	0	0	0	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	39	0	0	0	0	8	8	20.51
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor (unit)	21	0	0	0	0	7	7	33.33



1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	11 Paket = 62 unit = Brankas 1 Unit, Lemari kabinet 1 unit, Filling kabinet 8 unit, laptop 12 unit, printer 7 unit, kursi kerja 26 unit, kamera EOS 1 unit, proyektor 1 unit, sound system 1 unit, TV LED 2 unit, kulkas 2 unit	62	0	62	62	100	0	62	100.00		
1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	60	0	12	12	100	12	21	35.00		
1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor (Bulan)	48	0	0	0	0	12	9	18.75		
1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	3	0	1	1	100		1	33.33		
1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	165	0	5	5	100	20	5	3.03		
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	165	0	5	5	100	2	5	3.03		
1	0	0	1	0	0	0	0	0	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	0	100	88.09	88.09	100	44.045	44.05		



1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, laporan keuangan akhir tahun, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA, revisi renstra 2016-2021, ranwal renstra 2022-2026 (Dokumen)	28	0	6	6	100	6	11	39.29	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas (Dokumen)	8	0	0	0	0	2	0	-	
1	0	0	1	0	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)	33	0	33	33	100	0	33	100.00								
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7	Peringatan HUT Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pameran pembangunan OPD Dinas dalam rangka HUT Tapanuli Selatan (kali)	5	0	1	1	100	0	1	20.00	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	94.28	0	92.97	100	107.56	93.29	99.14	105.15	



1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)	120	0	0	0	0	30	0	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	2		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)	30	0	0	0	0	24	15.38	51.27	
											Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	94.28	0	92.97	100	107.56	93.29	99.14	105.15	
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)	100	0	0	0	0	70	0	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah karang taruna yang telah dibina	18	0	3	3	100	3	3	16.67	
											Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)	75	0	63.33	65.60	103.58	65	50.17	66.89	
											Peresentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	94.28	0	92.97	100	107.56	93.29	99.14	105.15	



												Persentase penyelesaian konflik (%)	90	0	100	100	100	80	50	55.56	
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)	24	0	0	0	0	0	6	0	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang mendapat bantuan fasilitasi usaha (orang)	420	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Penanganan konflik sosial	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM TKSK dan penanganan kasus di LK3 (orang)	150	0	30	21	68.97	0	21	14.00		
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keperintisan masyarakat (Kali)	5	0	0	0	0	1	0	-		



Penjelasan dari Tabel 2.1.3 diatas adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya. Capaian kinerja program ini adalah persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial triwulan III 2018 yaitu sebesar 98,28%. Program ini didukung kegiatan Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya dengan realisasi capaian sebesar 100 orang; dan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Tim PMKS dan Pemberian Bantua ke Panti Sosial sebanyak 8 Panti yaitu 4 unit Panti Asuhan Anak dan 4 unit Panti Jompo. Sedangkan kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin; dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum terlaksana.
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan indikator kinerja persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial sebesar 0%. Kegiatan pendukung program ini adalah Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak; Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi PMKS; dan Pelatihan Taruna Siaga Bencana belum terlaksana. Sedangkan kegiatan Pembinaan/Monitoring PKH capaian kinerja triwulan II 2018 adalah 20 orang.
- c. Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo. Capaian kinerja program ini adalah jumlah panti asuhan anak sebanyak 4 unit panti asuhan anak dan 4 unit panti jompo. Program ini didukung kegiatan seperti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo belum terlaksana.



- d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan capaian kinerja triwulan III 2018 adalah 15,38% sebagai persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial. Program ini didukung seperti Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan belum terlaksana.
- e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan capaian kinerja triwulan III 2018 adalah belum adanya karang taruna yang dibina. Program ini didukung kegiatan seperti Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat; dan Pelestarian Nilai-Nilai Kesetiakawanan belum terlaksana.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Selatan melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai bagian yang Integral dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan akan mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.



Visi :

”Tapanuli Selatan yang Maju, Adil Berlandaskan Agama dan Adat Budaya”

Misi :

”Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul, Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”

Adapun yang menjadi indikator utama Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

1. Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan
Cakupan pelayanan administrasi sosial organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah merupakan program kegiatan rutin dengan target sebesar 65% dan realisasi per Triwulan III 2018 sebesar 34,74%.
2. Sarana panti asuhan yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan
Sarana panti asuhan yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2018 sebanyak 4 unit.
3. Sarana panti jompo yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan
Sarana panti jompo yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2018 sebanyak 4 unit.
4. Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial
Adapun persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial per Triwulan III 2018 sebesar 98,28% dengan jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial sebanyak 69.027 orang.
5. Persentase penanganan PMKS
Persentase penanganan PMKS per Triwulan III 2018 adalah sebesar 56,93% dengan jumlah PMKS yang mendapat penanganan sosial sebanyak 39.296 orang.



Adapun sarana sosial yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah panti asuhan anak dan panti sosial tresna werda/panti jompo. Panti asuhan tersebut seluruhnya dimiliki oleh pihak yayasan Sejak tahun 2011-2018 jumlah panti asuhan di Kabupaten Tapanuli Selatan dari belum ada perubahan yakni sebanyak 4 panti asuhan anak dan 4 panti asuhan jompo, seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Panti Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018

No (1)	Panti Sosial (2)	Desa/ Kecamatan (3)
Panti Sosial Anak/Panti Asuhan		
1	Panti Asuhan Maimun	Desa Basilam baru Kec. Batang Angkola
2	Panti Asuhan Titian Ridho Ilahi	Desa Huta Holbung Kec. Batang Angkola
3	LKS. Amalia Attahir	Desa Huta Tonga Kec. Batang Angkola
4	Al-Hijrah	Kelurahan Bintuju Kec. Batang Angkola
Panti Sosial Tresna Werda/ Panti Jompo		
5	Majelis Ta'lim Syech Mhd. Baqi	Desa Basilam Baru Kec. Batang Angkola
6	Jabalul Madaniyah	Desa Sijungkang Kec. Angkola Timur
7	Nurul Falah Tamosu	Desa Panompuan Kec. Angkola Timur
8	Titian Ridho Ilahi	Desa Huta Tonga Kec. Batang Angkola

Sumber : Bidang Pemberdayaan Sosial, 2018

Sedangkan jumlah PMKS di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mendapatkan penanganan dengan memperoleh bantuan sosial selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan secara terus menerus, meskipun masih banyak yang belum menerima bantuan sosial. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran sehingga belum sepenuhnya bisa tertangani.



Tabel 2.2.2
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Tahun 2012 hingga September 2018

Uraian	Tahun							Per September 2018
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan (jiwa)	20.145	23.143	23.531	27.112	26.939	70.194	69.027	
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan (jiwa)	33.770	32.380	31.894	29.370	29.370	70.194	70.234	
Persentase PMKS yang Memperoleh bantuan sosial (%)	65,7	74,06	76,41	92,31	91,72	100	98,28	

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2018

Adapun laju pertumbuhan PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan hingga September Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.3
Laju Pertumbuhan PMKS Tahun 2012- September 2018

Uraian	Laju Pertumbuhan (%)							Rata-Rata Laju Pertumbuhan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Per September 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan (jiwa)	1,71	12,95	1,65	13,21	(0,64)	61,62	(1,69)	12,69
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan (jiwa)	5,56	(4,29)	(1,52)	(8,59)	0,00	58,16	0,06	0,06

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2018

Adapun data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menurut kategori adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2.4
Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Tahun 2017- September 2018

KATEGORI PMKS	YANG SEHARUSNYA MENDAPAT BANTUAN SOSIAL			YANG MENDAPAT BANTUAN SOSIAL				
	JUMLAH			JUMLAH				
	TAHUN 2017	TAHUN 2018	SATUAN	TAHUN 2017	%	TAHUN 2018	SATUAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	70,194	70,234	Orang	70,194	100	69,027	Orang	98.28
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	69,503	69,543	Orang	69,503		68,336	Orang	
Anak Jalanan	-	-	Orang	-		-	Orang	
Penderita Sakit Jiwa	30	30	Orang	30		-	Orang	
Gepeng (Gembel dan Pengemis)	-	-	Orang	-		-	Orang	
Penderita HIV/AIDS	-	-	Orang	-		-	Orang	
Pecandu Narkoba	-	-	Orang	-		-	Orang	
Fakir Miskin	68,300	68,300	Orang	68,300		68,300	Orang	
Bayi Terlantar	1	1	Orang	1		1	Orang	
Anak Terlantar	2	-	Orang	2		-	Orang	
Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga	-	-	Orang	-		-	Orang	
Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah	-	-	Orang	-		-	Orang	
Anak Korban Kekerasan Lingkungan Masyarakat	-	-	Orang	-		-	Orang	
Anak Korban Kekerasan Seksual	-	-	Orang	-		-	Orang	
Lanjut Usia Terlantar	140	120	Orang	140		-	Orang	
Komunitas Adat Terpencil	-	-	Orang	-		-	Orang	
Penyandang Tuna Netra	10	10	Orang	10		-	Orang	
Penyandang Tuna Rungu	2	2	Orang	2		-	Orang	
Penyandang Tuna Wicara	4	4	Orang	4		1	Orang	
Penyandang Tuna Wicara – Rungu	4	4	Orang	4		-	Orang	
Penyandang Tuna Daksa	-	-	Orang	-		-	Orang	
Penyandang Tuna Grahita	-	-	Orang	-		-	Orang	
Penyandang Buta Aksara	-	-	Orang	-		-	Orang	
Penyandang Cacat Fisik	1,010	1,010	Orang	1,010		14	Orang	
Tuna Susila	-	-	Orang	-		-	Orang	
Bekas Narapidana	-	-	Orang	-		-	Orang	
Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	62	Orang	-		20	Orang	
Penyandang LGBT	-	-	Orang	-		-	Orang	
Korban LGBT	-	-	Orang	-		-	Orang	



Panti Asuhan

Panti Sosial Asuhan Anak

Jumlah Panti	4	4	Unit	4	4	Unit
Jumlah Penghuni	505	505	Orang	505	505	Orang
Jumlah Pekerja Sosial Profesional	2	2	Orang	2	2	Orang
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial	14	-	Orang	-	-	Orang
Panti Sosial Tresna Wirda						
Jumlah Panti	4	4	Unit	4	4	Unit
Jumlah Penghuni	186	186	Orang	186	186	Orang
Jumlah Pekerja Sosial Profesional	-	-	Orang	-	-	Orang

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2018

Dalam meningkatkan pelayanan sosial di kecamatan maka Dinas Sosial Daerah dibantu oleh TKSK, Tagana, Pendamping PKH, Pendamping Aslut, Pendamping ASODK Berat, dan Pekerja Sosial. Adapun Daftar TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan), Tagana (Taruna Siaga Bencana), Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), Pendamping Aslut (Asistensi Lanjut Usia Terlantar), Pendamping ASODK (Asistensi Orang dengan Kecacatan) Berat, dan Pekerja Sosial (Peksos) adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2.5
Daftar TKSK, Tagana, Pendamping PKH, Pendamping Aslut,
Pendamping ASODK Berat, dan Peksos Tahun 2018

No.	Kecamatan	Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) (Orang)	Taruna Siaga Bencana (Tagana) (Orang)	Pendamping PKH (Orang)	Pendamping Aslut (Orang)	Pendamping ASODK Berat (Orang)	Pekerja Sosial (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aek Bilah	1	-	2	-	1	-
2	Angkola Barat	1	4	6	3	1	-
3	Angkola Sangkunar	1	2	5	-	1	-
4	Angkola Selatan	1	3	9	-	1	-
5	Angkola Timur	1	1	4	3	1	-
6	Arse	1	2	2	-	1	-
7	Batang Angkola	1	2	5	4	1	-
8	Batang Toru	1	3	3	-	1	-
9	Marancar	1	3	2	-	1	-
10	Muara Batang Toru	1	3	3	-	1	-
11	Saipar Dolok Hole	1	-	5	-	1	-
12	Sayurmatangi	1	1	3	-	1	-
13	Sipirok	1	3	4	-	1	-
14	Tantom Angkola	1	1	2	-	1	-
15	Koordinator Kabupaten			1			
16	Operator Kabupaten			2			
17	Supervisor			1			
18	Kabupaten Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	2
Total		14	28	64	10	14	2

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2018



Tugas dan tanggungjawab Pendamping Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitator, yakni membantu masyarakat dan keluarga untuk menyadari, mengenali penyandang disabilitas yang ada di lingkungannya serta masalah yang dihadapi keluarga atau wali;
- b. Motivator, yakni mendorong, mengajak dan mempengaruhi keluarga/wali untuk melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalahnya;
- c. Inovator, yakni bersama masyarakat melahirkan gagasan baru yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah;
- d. Mengikuti pertemuan pendamping untuk tukar menukar informasi dan berbagai pengalaman dalam melaksanakan pendampingan;
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan pendampingan pelaksanaan secara periodik ke Dinas/Instansi Sosial Kabupaten;
- f. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota serta aparat Desa/Kelurahan setempat;

Tugas dan tanggungjawab Pendamping Penerima Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) adalah :

- a. Bersama-sama dengan koordinator membantu dan turut bertanggungjawab terhadap kelancaran pencairan dana bantuan ASLUT;
- b. Melaksanakan bimbingan bila terjadi kasus lanjut usia, mendampingi penerima, keluarga untuk mengambil bantuan Program Aslut ke lembaga penyalur terdekat dengan membawa Surat Kuasa dari Penerima;
- c. Memantau dan membimbing pemanfaatan dana Aslut sesuai dengan tujuan program;



- d. Mengikuti pertemuan pendamping untuk tukar menukar informasi dan berbagai pengalaman dalam melaksanakan pendampingan;
- e. Membuat laporan hasil pendampingan pelaksanaan program Aslut secara periodic ke Dinas/Instansi Sosial Kabupaten;
- f. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota serta aparat Desa/Kelurahan setempat;
- g. Melaksanakan kunjungan rumah (*home visit*) secara berkala dan membuat laporan perkembangan kondisi fisik dan sosial penerima Aslut.

Tugas dan tanggungjawab Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yaitu :

- a. Pendampingan sosial dalam rangka perlindungan sosial anak atau permasalahan anak;
- b. Pendampingan penguatan lembaga perlindungan anak;
- c. Penguatan masyarakat dalam perlindungan anak;
- d. Respon kasus atas permasalahan kasus anak.

Tugas dan tanggungjawab Taruna Siaga Bencana adalah sebagai berikut saat :

- a. Pra Bencana
 1. Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
 3. Pengurangan resiko bencana di lokasi rawan bencana;
 4. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
 5. Fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Siaga Bencana;
 6. Pendeteksian dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;



7. Evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam perlindungan sosial atas ancaman bahaya;
 8. Pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya.
- b. Tanggap Darurat
1. Kaji cepat dan melaporkan identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas/instansi sosial serta berkoordinasi dengan tim reaksi cepat bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 2. Identifikasi/pendataan korban bencana;
 3. Operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;
 4. Operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
 5. Operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
 6. Operasi tanggap darurat pada bidang logistic;
 7. Operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
 8. Mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko;
 9. Upaya tanggap darurat lainnya.
- c. Pasca Bencana
1. Identifikasi/pendataan kerugian material pada korban bencana;
 2. Identifikasi/pendataan kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
 3. Penanganan bidang psikososial dan rujukan;
 4. Upaya penguatan dan pemulihan sosial korban bencana sosial berkoordinasi dengan pihak terkait;
 5. Pendampingan dalam advokasi sosial.



Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten terkait implementasi PKH dan sinkronisasi dengan program bantuan komplementer lainnya;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola data dan melaporkan implementasi :
 1. Pertemuan awal dan validasi keluarga penerima manfaat (KPM);
 2. Verifikasi dan komitmen KPM untuk berpartisipasi di dalam PKH;
 3. Memutakhirkan data KPM dan fasilitasi dalam menyelesaikan kasus pengaduan masyarakat;
 4. Penyaluran bantuan sosial PKH;
 5. Mengelola dokumen dan data terkait PKH.
- c. Bersama dengan pekerja sosial supervisor mengkoordinasikan perencanaan dan pelaporan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2);
- d. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan PKH di seluruh kecamatan lokasi tugasnya;
- e. Mengkoordinasikan proses mediasi, fasilitasi, dan advokasi kepada keluarga penerima manfaat PKH di seluruh kecamatan lokasi tugasnya untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan program komplementer lainnya.



Pendamping Program Keluarga Harapan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH tepat jumlah dan ttepat sasaran;
- b. Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan kelaurga bersama keluarga penerima manfaat PKH paling sedikit 1 kali setiap bulan;
- c. Memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

Tenaga Kerja Sosial Kecamatan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pemetaan sosial berupa data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan/atau dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, dan kecamatan;
- c. Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan PSKS dan sumberdaya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Melakukan sinergi, integritas, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;



- e. Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak;
- f. Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sedangkan karang taruna yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2.6
Daftar Karang Taruna Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Karang Taruna (KT)
(1)	(2)	(3)
1	Aek Bilah	3
2	Angkola Barat	6
3	Angkola Sangkununur	10
4	Angkola Selatan	5
5	Angkola Timur	10
6	Arse	8
7	Batang Angkola	6
8	Batang Toru	3
9	Marancar	12
10	Muara Batang Toru	5
11	Saipar Dolok Hole	7
12	Sayurminatinggi	19
13	Sipirok	36
14	Tantom Angkola	8
15	Kecamatan	14
16	Kabupaten	1
Total		153

Sumber : Bidang Pemberdayaan Sosial, 2018

Kegiatan Pendataan Cacat dan Penyakit Kejiwaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendata jumlah orang dengan kecacatan berat, lanjut usia terlantar dan yang memiliki penyakit kejiwaan di Kabupaten Tapanuli Selatan sedangkan



pendataan cacat dan penyakit kejiwaan untuk tahun 2018 belum dilaksanakan. Adapun data penerima bantuan asistensi orang dengan kecacatan (ASODK) berat, asistensi lanjut usia terlantar (Aslut) dan penyakit kejiwaan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.7
Daftar Penerima Bantuan ASODK Berat, Aslut
dan Penyakit Kejiwaan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Kecacatan Berat (Orang)	Penyakit Kejiwaan (Orang)	Lanjut Usia terlantar (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aek Bilah	3	5	-
2	Angkola Barat	13	-	35
3	Angkola Sangkunur	12	2	-
4	Angkola Selatan	7	-	-
5	Angkola Timur	5	-	39
6	Arse	5	3	-
7	Batang Angkola	11	2	46
8	Batang Toru	9	-	-
9	Marancar	10	-	-
10	Muara Batang Toru	8	-	-
11	Saipar Dolok Hole	8	8	-
12	Sayurmatangi	13	4	-
13	Sipirok	7	4	-
14	Tantom Angkola	7	2	-
Total		118	30	120

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial, 2018

Penerima bantuan asistensi orang dengan kecacatan berat (ASODK Berat) tahun 2017 menerima bantuan uang sebanyak Rp. 300.000,- per bulan selama 10 bulan sedangkan tahun 2018 mendapat bantuan uang sebanyak Rp. 500.000,- untuk 3 bulan yang selanjutnya bantuan terhadap ASODK Berat dikategorikan ke dalam Program Keluarga Harapan. Penerima asistensi lanjut usia terlantar (Aslut) tahun 2017 mendapat bantuan uang sebanyak Rp. 200.000,- per bulan selama 10 bulan. Bantuan asistensi



ASODK Berat maupun Aslut bersumber dana APBN Tahun 2017 dan 2018.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan menurun 0,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan garis kemiskinan di Kabupaten Selatan meningkat menjadi 326.321 per kapita per bulan.

Tabel. 2.2.8
Indikator Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2014-2016

Indikator	Satuan	Tahun		
		2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,74	11,37	11,15
Jumlah Penduduk Miskin	Ribuan Jiwa	29,38	31,20	30,84
Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)	Persen	293.441	300.449	326.321
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Persen	1,91	1,28	1,06
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persen	0,46	0,22	0,19

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2017

Adapun daftar Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Penerima Bantuan Iuran (PBI), Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dapat dilihat pada table berikut ini :



Tabel 2.2.9
Daftar BDT Kesejahteraan Sosial, KKS, PKH dan Dapodik
Tahun 2018*

No.	KECAMATAN	BDT (Keluarga)	KKS (Keluarga)	PKH (Keluarga)	PBI (Keluarga)	Dapodik (Keluarga)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aek Bilah	686	525	185	282	686
2	Angkola Barat	2,042	1,590	1,165	1,417	2,042
3	Angkola Sangkunur	1,892	1,288	930	858	1,892
4	Angkola Selatan	3,129	2,146	1,288	1,593	3,129
5	Angkola Timur	2,539	1,229	800	1,176	2,539
6	Arse	879	558	312	495	879
7	Batang Angkola	3,689	1,938	1,270	1,700	3,689
8	Batang Toru	1,757	873	587	704	1,757
9	Marancar	1,037	650	412	482	1,037
10	Muara Batang Toru	1,133	759	548	540	1,133
11	Saipar Dolok Hole	1,631	1,146	727	987	1,631
12	Sayurminggi	2,579	1,602	1,047	1,363	2,579
13	Sipirok	2,850	1,694	873	1,423	2,850
14	Tantom Angkola	1,736	1,077	660	955	1,736
Total		27,579	17,075	10,804	13,975	27,579

Sumber : Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2018

*Merupakan Hasil Pemutakhiran Data Terpadu Tahun 2015

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang selanjutnya disebut dengan bantuan beras sejahtera (Rastra) merupakan bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sejumlah 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus. Penerima manfaat bansos rastra adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) bansos rastra yang nama dan alamatnya termasuk di dalam daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Adapun mekanisme bansos rastra ini dimulai dari penugasan Kementerian Sosial kepada Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran bansos rastra sampai ke titik distribusi (TD). Setelah bansos rastra sampai di titik distribusi, pihak Perum Bulog



menyerahkan bansos rastra tersebut ke pihak kabupaten/kota. Pihak kabupaten selanjutnya menyalurkan bansos rastra dari titik distribusi ke titik bagi (TB) hingga sampai ke KPM dengan menyerahkan bansos rastra dalam jumlah 10 kg setiap bulannya.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Kriteria komponen kesehatan PKH meliputi ibu hamil/menyusui; dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Kriteria komponen pendidikan PKH meliputi anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; anak sekolah menengah atas/madrasah Aliyah atau sederajat; dan anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Sedangkan kriteria komponen kesejahteraan sosial PKH meliputi lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Dalam penerimaan bantuan sosial program keluarga harapan, keluarga penerima



manfaat mendapat bantuan pendampingan melalui pendamping PKH.

Sedangkan jumlah peserta badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) menurut kepesertaan dan bulan di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.10
Jumlah Peserta BPJS di Kabupaten Tapanuli Selatan

Bulan	Jenis Kepesertaan		
	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Non PBI	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	132.872	54.816	187.688
Februari	134.363	55.315	189.678
Maret	134.503	55.869	190.372
April	134.318	57.510	191.828
Mei	133.926	57.781	191.707
Juni	133.627	58.932	192.559
Juli	133.661	58.065	191.726
Agustus	133.607	58.330	191.937
September	133.588	58.724	192.312
Oktober	141.442	59.349	200.791
November	141.389	53.507	194.896
Desember	141.334	53.914	195.248

Sumber : BPJS Kantor Cabang Padangsidimpuan, 2017

Berdasarkan tabel peserta BPJS di Kabupaten Tapanuli Selatan diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan peserta BPJS dari bulan januari hingga desember tahun 2017 melalui penerima bantuan iuran (PBI) per desember sebanyak 141.334 jiwa.

Evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2017 telah mencapai target yang ditetapkan tetapi belum maksimal, hal ini disebabkan sangat minimnya Anggaran.



Adapun anggaran yang teralokasi tahun 2017 sebesar Rp. 5.960.954.679,- dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.310.954.679,-
- Belanja Langsung : Rp. 3.650.000.000,-

dengan realisasi fisik dan keuangan tahun 2017 sebesar 91,59% atau Rp. 5.459.871.244,-.

Sedangkan anggaran yang teralokasi tahun 2018 sebesar Rp. 6.859.586.483 dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.710.523.763,-
- Belanja Langsung : Rp. 4.149.062.720,-

Dengan realisasi fisik dan keuangan per September tahun 2018 sebesar Rp. 3.231.493.237,- atau 47,11%.



Tabel 2.2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	TW III	Tahun		Tahun
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	Tahun 2018	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)			0	0	92.64	92.97	93.29	0	0	91.72	100	98.28	100	93.62		
	Jumlah peserta sosialisasi, petugas dan pendamping yang mengikuti sosialisasi (orang)			0	0	0	120	100	0	0	0	120	100	100	110		
	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)			0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	20	30		
	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)			0	0	0	24	10	0	0	0	24	0	10	10		
	Jumlah panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)			0	0	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8		
2	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)			0	0	0	35	37	0	0	0	35	0	37	39		
	Indeks Gini Rasio			0	0	0	<3	<3	0	0	0	<3	0	<3	<3		
	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)			0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10		



	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)			0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	50	
	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)			0	0	0	60	60	0	0	0	60	40	60	60	
	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)			0	0	0	14	15	0	0	0	14	15	15	15	
3	Persentase Penanganan para penyandang cacat dan trauma (%)			0	0	0	22	24	0	0	0	22	0	24	26	
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum			0	0	0	0	0.31	0	0	0	0	0	0.31	0.32	
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)			0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100	
	Tersusunnya dokumen penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Dokumen)			0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	
	Jumlah peserta pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (orang)			0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	15	
4	Sarana sosial panti asuhan (unit)			0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	4	4	
	Sarana sosial panti jompo (unit)			0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	4	4	
	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)			0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	30	
5	Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)			0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24	26	



	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)			0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	70	80	
6	Jumlah karang taruna yang telah dibina			0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	3	3	
	Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)			0	0	0	63.33	65	0	0	0	65.60	34.74	65	66.67	
	Persentase penyelesaian konflik (%)			0	0	0	100	80	0	0	0	100	0	80	83	
	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)			0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	6	
	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM TKSK dan penanganan kasus di LK3 (orang)			0	0	0	30	0	0	0	0	21	0	0	70	
	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keperintisan masyarakat (Kali)			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

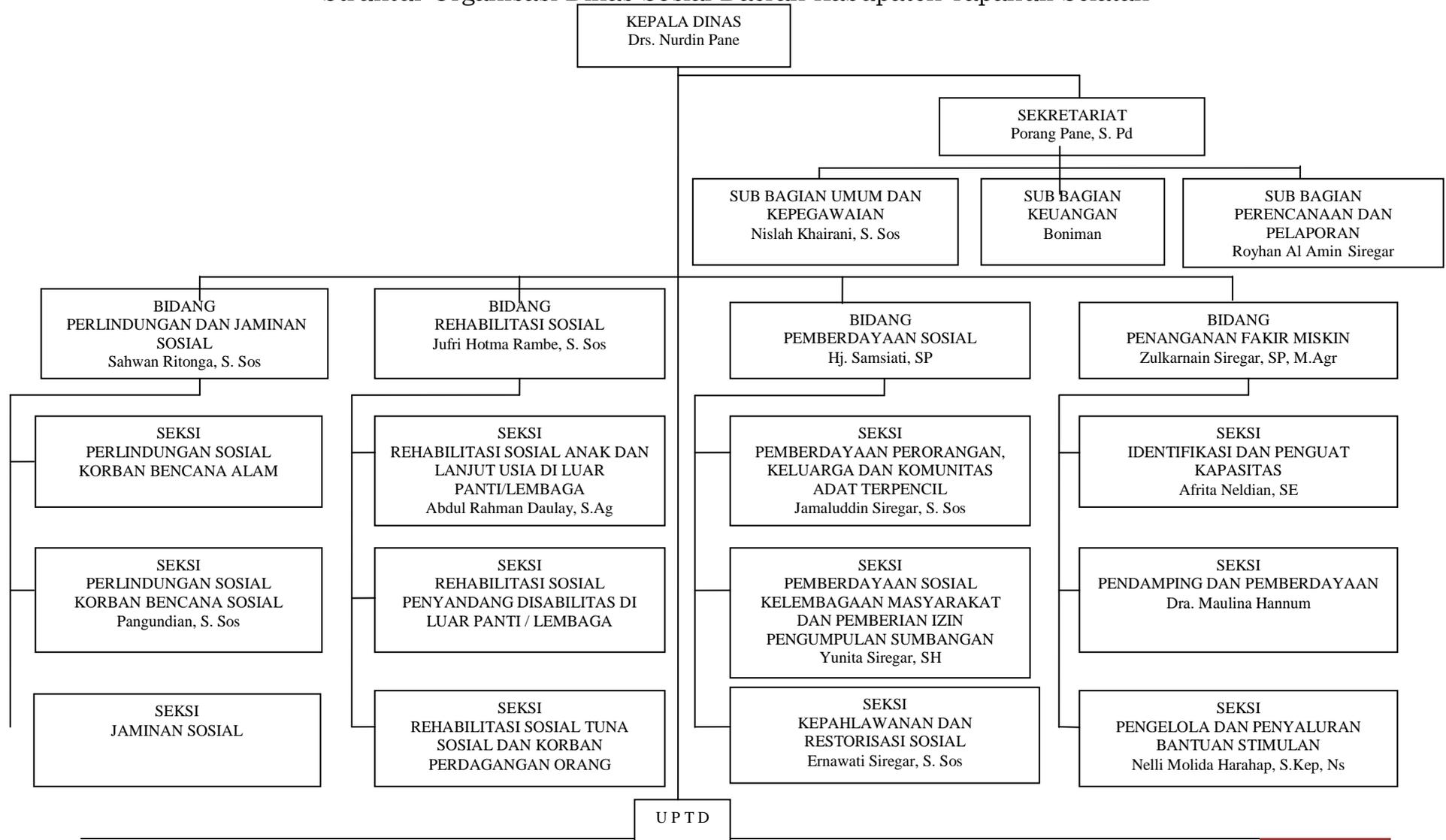
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Fungsi yang diemban adalah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis bidang sosial, seperti Perlindungan dan Jaminan sosial, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagan 1.
Struktur Organisasi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan





Sementara Uraian tugas pokok dan fungsi pejabat struktural satu tingkat dibawah Kepala Dinas (Eselon III/a dan III/b) adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris:

- 1) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas, memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan, Rumah Tangga, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
 - b. Koordinasi penyusunan perencanaan;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - g. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - i. Koordinasi penyusunan laporan kinerja dan tanggung jawab pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang sosial; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas, melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

- 1) Bidang rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- 2) Bidang rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan / atau lembaga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan / atau lembaga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan / atau lembaga;



- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga;
- e. Pengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- f. Pengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/ atau lembaga; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

- 1) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas, melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- 2) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

- 1) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin;
- 2) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
 - d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun daftar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Tabel 2.3.1

Daftar Pegawai dan THL (Tenaga Harian Lepas), Status serta
Jabatan Tahun 2018

No.	Nama Pegawai	Status Pegawai	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. Nurdin Pane	PNS	Kepala Dinas Sosial Daerah
2.	Porang Pane, S. Pd	PNS	Sekretaris
3.	Nislah Khairani, S. Sos	PNS	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Boniman	PNS	Kasubbag Keuangan
5.	Royhan Al Amin Siregar	PNS	Plt. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
6.	Sahwan Ritonga, S. Sos	PNS	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
7.	Pangundian, S. Sos	PNS	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
8.	Hj. Samsiati, SP	PNS	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
9.	Jamaluddin Siregar, S. Sos	PNS	Kasi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil
10.	Yunita Siregar, SH	PNS	Kasi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan
11.	Ernawati Siregar, S. Sos	PNS	Kasi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
12.	Jufri Hotma Rambe, S. Sos	PNS	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
13.	Abdul Rahman Daulay, S. Ag	PNS	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti/Lembaga
14.	Zulkarnain Siregar, SP, M. Agr	PNS	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin



15.	Afrita Neldian, SE	PNS	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
16.	Dra. Maulina Hanum	PNS	Kasi Pendampingan dan Pemberdayaan
17.	Nelli Molida Harahap, S. Kep, Ns	PNS	Kasi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan
18.	Marhamah, S. Sos	PNS	Staf Subbag Umum
19.	Purnama Nasution, S. Sos	PNS	Staf Subbag Umum
20.	Mhd Jefri Siregar	PNS	Staf Subbag Umum
21.	Khairuddin Siregar	PNS	Staf Subbag Umum
22.	Yevi Masripa	PNS	Staf Subbag Keuangan
23.	Fitrianti Harahap	PNS	Staf Perlindungan dan Jaminan Sosial
24.	Azhari, SH	PNS	Staf Pemberdayaan Sosial
25.	Muhammad Yusuf	PNS	Staf Pemberdayaan Sosial
26.	Khairun Nisa	PNS	Staf Rehabilitasi Sosial
27.	Parimpunan, SE	PNS	Staf Penanganan Fakir Miskin
28.	Sri Sartika Pospos	THL	Staf Subbag Umum
29.	Elisa Fatmawati, S.Tr.Keb	THL	Staf Subbag Umum
30.	Ali Sahbana Harahap	THL	Staf Subbag Umum
31.	Eni Herawani, S. Pd	THL	Staf perlindungan dan Jaminan Sosial
32.	Shusi Novita Siregar, S. Pi	THL	Staf Pemberdayaan Sosial
33.	Uswatun Hasanah, S. Pt	THL	Staf Rehabilitasi Sosial
34.	Rasyid Anhar Lubis	THL	Staf Penanganan Fakir Miskin

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2018

Adapun rekapitulasi jumlah ASN yang terisi di Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 2.3.2

Jumlah ASN yang Terisi di Dinas Sosial Daerah Tahun 2018

No.	Sekretariat/Bidang	Jumlah ASN				
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf PNS	THL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sekretariat	1	1	3	5	3
2.	Bidang Penanganan Fakir Miskin	0	1	3	0	1
3.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	0	1	1	2	1
4.	Bidang Rehabilitasi Sosial	0	1	1	1	1
5.	Bidang Pemberdayaan Sosial	0	1	3	2	1
Total		1	5	11	10	7

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2018

Berdasarkan jumlah ASN yang terisi pada Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah ASN di Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 34 orang diantaranya ASN PNS sebanyak 27 orang dan Non PNS atau THL sebanyak 7 orang. ASN PNS eselon 2 dan eselon 3 sudah terpenuhi.

Sedangkan eselon 4 masih ada yang kosong, seperti Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial eselon 4 yang dibutuhkan sebanyak 3 orang sedangkan yang tertampung hanya 1 orang. Kepala Seksi yang kosong adalah Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Kepala Seksi Jaminan Sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial juga masih ada eselon 4 yang kosong seperti Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti/Lembaga dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.



Sehingga jumlah eselon 4 yang belum tertampung sebanyak 4 orang. Sedangkan jumlah staf dinas hanya 10 orang dan THL sebanyak 7 orang. Berdasarkan data tersebut ketersediaan ASN di Dinas Sosial Daerah belum dapat memenuhi kebutuhan ASN di Dinas Sosial Daerah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Daerah.

Daftar inventaris Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2018 dalam mendukung kinerja ASN adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.3
Daftar Barang Inventaris Dinas Sosial Daerah
Tahun 2018

No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mobil Daihatsu Terios	1 Unit	2007
2.	Mobil Kijang Innova	1 Unit	2015
3.	Sepeda Motor Honda Supra GTR	2 Unit	2017
4.	Sepeda Motor Honda CB150R	1 Unit	2017
5.	Lemari Merek Montana	1 Unit	2017
6.	Filling Besi Merek Yunika	2 Unit	2011
7.	Filling Besi Merek Awiko	4 Unit	2017
8.	Filling Besi Merek Montana	4 Unit	2017
9.	Brankas	1 Unit	2017
10.	Lemari Kaca	1 Unit	2005
11.	Lemari Kayu	1 unit	2013
12.	Kursi Putar Merek Phoenik	3 Unit	2016
13.	Kursi Lipat Merek Chitose	20 Unit	2017
14.	Meja Biro Merek Sands	2 Unit	2016
15.	Lemari Es Merek LG 1 Pintu	2 Unit	2017
16.	Lemari Es Merek Sharp	1 Unit	2012
17.	Dispenser	1 Unit	2012



18.	Televisi LED 28” Merek LG	2 Unit	2017
19.	Sound System DAT/MP 8900 Rocky	1 Unit	2017
20.	Personal Computer (PC) Merek BenQ	1 Unit	2012
21.	Personal Computer (PC) Merek Asus	1 Unit	2015
22.	Laptop Merek Acer	1 Unit	2013
23.	Note Book Merek Asus 14”	1 Unit	2015
24.	Note Book Merek ASUS FX553VD	12 Unit	2017
25.	Printer Merek Epson L385	7 Unit	2017
26.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	2013
27.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural Merek Sands	3 Unit	2016
28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6 Unit	2017
29.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-Lain Merek Chitose	20 Unit	2012
30.	Proyektor Merek Optoma	1 Unit	2017
31.	Kamera Merek Canon EOS 80D	1 Unit	2017
32.	Pesawat Telepon Merek Panasonic	1 Unit	2007
Total		107 Unit	

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2018

Data pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan struktural adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3.4
Daftar Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional dan Struktural Tahun 2018

No.	Nama	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Struktural
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. Nurdin Pane	-	Diklat PIM Tk. III
2.	Porang Pane, S. Pd	Diklat Proses Pembukuan, Verifikasi dan Penatausahaan LPJ Bendahara di Lingkungan OPD Kabupaten/Kota dan Provinsi	Diklat PIM Tk. III
3.	Pangundian, S. Sos	-	ADUM/PIM Tk. IV
4.	Zulkarnain Siregar, SP, M.Agr	-	Diklat PIM Tk. III
5.	Hj. Samsiati, SP	-	Diklat PIM Tk. IV
6.	Jufri Hotma Rambe, S. Sos	-	Diklat PIM Tk. IV
7.	Yunita Siregar	-	Diklat PIM Tk. IV
8.	Royhan Al Amin Siregar	Diklat Dasar PMHP Ahli Diklat PPNS PMHP Kementan RI Diklat LKj Diklat Renstra dan Renja	-
9.	Nislah Khairani, S. Sos	Diklat SKP	ADUM/ PIM Tk.IV
10.	Boniman	Diklat Proses Pembukuan, Verifikasi dan Penatausahaan LPJ Bendahara di Lingkungan OPD Kabupaten/Kota dan Provinsi	-
11.	Mhd Jefri Siregar	Diklat Penghapusan Barang Aset Inventaris	-

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2018



Pelaksanaan program pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan masih dihadapi hambatan-hambatan yang memerlukan penanganan dan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program.

Ada beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan juga akan menjadi penghalang bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Daerah yaitu belum mencukupinya jumlah pegawai dan masih terbatasnya keahlian teknis administrasi pegawai yang ada.

Dampak dari terbatasnya jumlah pegawai dan terbatasnya keahlian menyebabkan belum optimalnya mutu administrasi. Untuk mendukung kondisi yang diinginkan maka perlu peningkatan kemampuan teknis, sarana prasarana kerja dipenuhi sesuai standard dan kuantitas pegawai juga perlu ditambah jumlahnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, antara lain :

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jumlahnya meningkat setiap tahun sehingga sasaran selalu lebih banyak dari capaian, dimana rata-rata laju pertumbuhan PMKS yang mendapat bantuan sosial hingga Triwulan III Tahun 2018 sebesar 12,69%, dan yang menambah permasalahan adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Sarana dan prasarana serta SDM masih belum mencukupi baik jumlah maupun kapabilitas pegawai, sehingga diperlukan sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM seperti UPTD bidang kesejahteraan sosial pendidikan dan pelatihan bagi



- pegawai dinas dan pendamping kesejahteraan sosial, serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Sinkronisasi penganggaran antara Pemerintah Provinsi dan Pusat dengan Kabupaten untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial belum optimal, hal ini disebabkan data base PMKS belum tersedia yang digunakan sebagai dasar dalam perumusan program kegiatan yang telah sinkron dengan provinsi dan pusat;
 4. Masih belum optimalnya koordinasi/kerjasama dengan SKPD serumpun dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dari permasalahan sosial yang perlu mendapat perhatian dan keterkaitan dengan urusan serta kewenangan Dinas Sosial Daerah maka isu strategis saat ini yang cukup menonjol dalam pembangunan kesejahteraan sosial terutama untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bidang sosial Tahun 2016-2021, yang menjadi prioritas penanganan adalah :

1. Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan kesejahteraan sosial pada pusat-pusat pelayanan;
2. Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dimana jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial per Triwulan III Tahun 2018 sebesar 69.027 orang atau 98,28% dari 70.234 orang yang seharusnya menerima bantuan sosial. Sedangkan jumlah penduduk kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 9,91% dengan persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 90,09%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio persentase



penduduk diatas garis kemiskinan meningkat sebesar 0,13% dan persentase jumlah penduduk miskin menurun sebesar 0,13%;

3. Kurangnya pemahaman tentang peranan dan partisipasi perempuan serta kurangnya kepedulian terhadap perlindungan anak dalam pembangunan, terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.

2.4 Review Terhadap RKPD 2019

RKPD Tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Daerah Tahun 2019, dimana dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Sosial Daerah.

Adapun review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 terhadap Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rencana Strategis OPD Tahun 2019
Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	URUSAN WAJIB					URUSAN WAJIB				
	BIDANG SOSIAL					BIDANG SOSIAL				
	DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN				4,382,914,000	DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN				2,739,698,636
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Tapanuli Selatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	592,956,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Tapanuli Selatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	823,561,720
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tapanuli Selatan	Terpenuhinya jasa surat - menyurat SKPD (Benda Pos)	150	1,000,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tapanuli Selatan	Terpenuhinya jasa surat - menyurat SKPD (Benda Pos)	160	960,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tapanuli Selatan	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (Bulan)	12	30,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tapanuli Selatan	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (Bulan)	12	55,700,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional, roda 4 : 3 unit dan roda 2 : 1 unit (Bulan)	12	7,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional, roda 4 : 4 unit dan roda 2 : 4 unit (Bulan)	12	10,000,000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Tapanuli Selatan	Peralatan kantor dalam kondisi baik (Bulan)	-	-	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Tapanuli Selatan	Peralatan kantor dalam kondisi baik (Bulan)	-	-
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	12	20,000,000	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	12	43,320,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (Bulan)	12	20,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (Bulan)	12	20,000,500



	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya komponen alat-alat listrik (Bulan)	12	20,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya komponen alat-alat listrik (Bulan)	12	5,002,400
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (Bulan)	12	20,000,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (Bulan)	12	6,002,500
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya surat kabar kantor/majalah dinas (Bulan)	12	20,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya surat kabar kantor/majalah dinas (Bulan)	12	19,200,000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor (Kotak)	1163	30,000,000	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor (Kotak)	350	18,550,000
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH)	250	193,500,000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH)	180	240,912,000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (OH)	220	80,000,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (OH)	280	47,050,000
	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Tapanuli Selatan	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 6 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang, pembantu pengurus barang pengguna 1 orang (%)	100	151,456,000	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Tapanuli Selatan	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 8 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang, pembantu pengurus barang pengguna 1 orang (Bulan)	12	356,864,320
2	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	Kab. Tapanuli Selatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)	33	31,656,000	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	Kab. Tapanuli Selatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)	33	-



	Peringatan HUT Tapanuli Selatan	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pameran pembangunan OPD Dinas dalam rangka HUT Tapanuli Selatan (kali)	1	31,656,000	Peringatan HUT Tapanuli Selatan	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pameran pembangunan OPD Dinas dalam rangka HUT Tapanuli Selatan (kali)	1	-
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Tapanuli Selatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100	318,373,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Tapanuli Selatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100	297,650,916
	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	2	50,000,000	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	-	-
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	2	20,000,000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	20	42,000,000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	6	23,373,000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	9	66,900,000
	Pengadaan Meubelair	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya meubelair kantor (unit)	3	20,000,000	Pengadaan Meubelair	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya meubelair kantor (unit)	1	13,880,916
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Brankas 1 Unit, Lemari kabinet 1 unit, Filling kabinet 8 unit, laptop 12 unit, printer 7 unit, kursi kerja 26 unit, kamera EOS 1 unit, proyektor 1 unit, sound system 1 unit, TV LED 2 unit, kulkas 2 unit (unit)	-	-	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Brankas 1 Unit, Lemari kabinet 1 unit, Filling kabinet 8 unit, laptop 12 unit, printer 7 unit, kursi kerja 26 unit, kamera EOS 1 unit, proyektor 1 unit, sound system 1 unit, TV LED 2 unit, kulkas 2 unit (unit)	-	-
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya gedung kantor (Bulan)	12	30,000,000	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya gedung kantor (Bulan)	12	23,200,000
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	12	70,000,000	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	12	126,070,000
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya perlengkapan kantor (Bulan)	12	15,000,000	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya perlengkapan kantor (Bulan)	12	-



	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantoor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya peralatan kantor (Bulan)	12	20,000,000	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantoor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya peralatan kantor (Bulan)	12	5,600,000
	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	1	70,000,000	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	1	20,000,000
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Tapanuli Selatan	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	100	33,970,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Tapanuli Selatan	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	100	36,000,000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah pakaian dinas harian dan tenun daerah (Stel)	78	16,000,000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah pakaian dinas harian dan tenun daerah (Stel)	72	36,000,000
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah pakaian olah raga dan pakaian lapangan (Stel)	80	17,970,000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah pakaian olah raga dan pakaian lapangan (Stel)	-	-
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	20	15,765,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	20	21,600,000
	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	20	15,765,000	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	3	21,600,000
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Tapanuli Selatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	15,855,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Tapanuli Selatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	62,386,000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, laporan keuangan akhir tahun, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA, revisi renstra 2016- 2021, ranwal renstra 2022-2026 (Dokumen)	5	9,355,000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA dan laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	6	62,386,000



	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas (Dokumen)	2	6,500,000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas (Dokumen)	-	-
7	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kab. Tapanuli Selatan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93.62	652,626,000	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kab. Tapanuli Selatan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93.62	351,000,000
			Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit)	4				Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit)	4	
			Sarana Sosial Panti Jompo (Unit)	4				Sarana Sosial Panti Jompo (Unit)	4	
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta sosialisasi, petugas dan pendamping yang mengikuti sosialisasi (orang)	110	127,626,000	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta sosialisasi, petugas dan pendamping yang mengikuti sosialisasi (orang)	-	-
	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	10	70,000,000	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	300	351,000,000
	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	30	50,000,000	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	-	-



	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah kepala keluarga yang menerima sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	30	200,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah kepala keluarga yang menerima sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	-	-
	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)	10	100,000,000	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)	-	-
	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja tim PMKS dan Pemberian bantuan ke panti Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)	8	105,000,000	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja tim PMKS dan Pemberian bantuan ke panti Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)	-	-
8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)	39	246,536,000	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)	39	892,500,000
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93.62				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93.62	
			Indeks Gini Rasio	<3,00				Indeks Gini Rasio	<3,00	
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)	10	20,000,000	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)	-	-
	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)	75	20,000,000	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)	-	-



	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal (orang)	10	30,000,000	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal (orang)	-	-
	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya pusat informasi penyandang cacat dan trauma center (unit)	1	30,000,000	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya pusat informasi penyandang cacat dan trauma center (unit)	-	-
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Kab. Tapanuli Selatan	jumlah orang yang memperoleh bantuan bagi PMKS (orang)	50	20,000,000	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Kab. Tapanuli Selatan	jumlah orang yang memperoleh bantuan bagi PMKS (orang)	20	159,500,000
	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Kab. Tapanuli Selatan	Meningkatnya perencanaan, pemutakhiran data, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, serta penanganan pengaduan bantuan sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai (%)	73	35,000,000	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Kab. Tapanuli Selatan	Meningkatnya perencanaan, pemutakhiran data, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, serta penanganan pengaduan bantuan sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai (%)	73	350,000,000
	Pembinaan/ monitoring Program Keluarga Harapan	Kab. Tapanuli Selatan	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	60	71,536,000	Pembinaan/ monitoring Program Keluarga Harapan	Kab. Tapanuli Selatan	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	60	236,000,000
	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	15	20,000,000	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	45	147,000,000
9	Program Pembinaan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Persentase penanganan anak terlantar (%)	26	336,395,000	Program Pembinaan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Persentase penanganan anak terlantar (%)	26	-
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0,32				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0,32	



			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)	100				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)	100	
			Persentase tenaga kerja di bawah umur (%)	0,02				Persentase tenaga kerja di bawah umur (%)	0,02	
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93.62				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93.62	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar (Unit)	1	166,395,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar (Unit)	1	-
	Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya dokumen analisis permasalahan anak terlantar (dokumen)	1	90,000,000	Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya dokumen analisis permasalahan anak terlantar (dokumen)	1	-
	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah tenaga pembinaan anak terlantar pada pelatihan keterampilan (orang)	10	80,000,000	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah tenaga pembinaan anak terlantar pada pelatihan keterampilan (orang)	10	-
10	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Persentase Penanganan para penyandang cacat dan trauma (%)	26	358,821,000	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Persentase Penanganan para penyandang cacat dan trauma (%)	26	-
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0,32				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0,32	



			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)	100				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)	100	
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93.62				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93.62	
	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya dokumen penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Dokumen)	1	70,000,000	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya dokumen penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Dokumen)	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma (unit)	1	80,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma (unit)	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (orang)	15	88,821,000	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (orang)	-	-
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta penyandang cacat dan eks trauma yang diberdayakan (orang)	15	50,000,000	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta penyandang cacat dan eks trauma yang diberdayakan (orang)	-	-
	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan keterampilan bagi tenaga pelatihan dan pendidik (orang)	12	70,000,000	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan keterampilan bagi tenaga pelatihan dan pendidik (orang)	-	-
11	Program pembinaan panti asuhan/ jompo	Kab. Tapanuli Selatan			269,116,000	Program pembinaan panti asuhan/ jompo	Kab. Tapanuli Selatan			-
			Sarana sosial panti asuhan (unit)	4				Sarana sosial panti asuhan (unit)	4	
			Sarana sosial panti jompo (unit)	4				Sarana sosial panti jompo (unit)	4	



	Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan/jompo (unit)	1	80,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan/jompo (unit)	-	-
	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Meningkatnya penyelenggaraan panti asuhan/jompo (%)	80	30,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Meningkatnya penyelenggaraan panti asuhan/jompo (%)	-	-
	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)	30	80,000,000	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)	-	-
	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik bagi penghuni panti asuhan/jompo (orang)	12	79,116,000	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik bagi penghuni panti asuhan/jompo (orang)	-	-
12	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Kab. Tapanuli Selatan	Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)	26	232,542,000	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Kab. Tapanuli Selatan	Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)	26	-
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93.62				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93.62	
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (orang)	10	30,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (orang)	-	-
	Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial (unit)	1	30,000,000	Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial (unit)	-	-
	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan (orang)	10	50,000,000	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan (orang)	-	-



	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)	80	122,542,000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial dan penyusunan dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)	-	-
13	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah karang taruna yang telah dibina	3	1,278,303,000	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah karang taruna yang telah dibina	3	255,000,000
			Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)	66,67				Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)	66,67	
			Peresentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93.62				Peresentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93.62	
			Persentase penyelesaian konflik (%)	83				Persentase penyelesaian konflik (%)	83	
	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)	6	20,000,000	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)	-	-
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang mendapat bantuan fasilitasi usaha (orang)	70	1,078,303,000	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang mendapat bantuan fasilitasi usaha (orang)	150	225,000,000



	Penanganan konflik sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM TKSK dan penanganan kasus di LK3 (orang)	30	150,000,000	Penanganan konflik sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM TKSK dan penanganan kasus di LK3 (orang)	-	-
	Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan	Kab. Tapanuli Selatan	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keberintisan masyarakat (Kali)	1	30,000,000	Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan	Kab. Tapanuli Selatan	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keberintisan masyarakat (Kali)	1	30,000,000
TOTAL					4,382,914,000					2,739,698,636



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masyarakat. Adapun aspirasi masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial berupa pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan usaha produktif PMKS.

Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum, khususnya Dinas Sosial Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Daerah Tahun 2019 didasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten, rancangan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada forum OPD Kabupaten tidak banyak usulan yang disampaikan pada saat pembahasan hanya bersifat masukan berupa harapan terhadap rencana pelaksanaan program kegiatan.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial RI dalam 5 tahun (2015-2019) akan melaksanakan 3 (tiga) dari 7 (tujuh) misi pemerintah, yaitu misi keempat : Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; misi kelima : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; misi ketujuh : Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan. Sedangkan dalam agenda prioritas nasional yang dikenal dengan Nawacita, Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Nawacita, yaitu Nawacita ketiga : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; Nawacita kelima : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Nawacita kedelapan : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan Nawacita kesembilan : Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sehingga peran dan fungsi Kementerian Sosial akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, komunitas adat terpencil (KAT) serta kelompok marjinal lainnya yang dilandasi semangat kegotong-royongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009, merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,



dan perlindungan sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sedangkan menurut RPJMN 2015-2019, perlindungan sosial yang komprehensif merupakan amanat yang diemban Kementerian Sosial RI dan merupakan perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar sektoral untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan. Secara umum permasalahan sosial dapat dikelompokkan menjadi :

1. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marjinal lainnya;
2. Permasalah sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang belum komprehensif, termasuk membedakan antara asistensi regular dan asistensi temporer bagi penduduk miskin dan rentan;
3. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses penjangkauan pelayanan dasar.

Adapun Faktor-faktor Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Daerah yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari kebijakan nasional adalah sebagai berikut :



- a. Masih kurang kesadaran bagi masyarakat tentang pengertian PMKS;
- b. Belum lengkapnya data–data PMKS di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. Masih minimnya fasilitas di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- d. Keterbatasan dana APBD Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga dana untuk sebagian besar kegiatan Dinas belum tertampung;
- e. Keterbatasan dana yang tertampung untuk kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- f. Kurangnya perhatian masyarakat;
- g. Belum tertampungnya dana untuk identifikasi, sosialisasi ke daerah;
- h. Masih kurangnya motivasi masyarakat untuk kerja mandiri.

Sedangkan faktor–faktor pendorong pelayanan Dinas Sosial Daerah yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari Kebijakan Nasional :

- a. Adanya sarana untuk tempat pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. Besarnya animo masyarakat di pedesaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- c. Adanya sarana dan prasarana serta fasilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- d. Penyediaan dana untuk kegiatan PMKS dan penyediaan sarana dan prasarana.



Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, ada 3 (tiga) misi yang terkait erat dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan, antara lain :

- a. Misi Pertama yaitu Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Mandiri Dan Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta meningkatkan kepekaan sosial melalui pengembangan berbagai program yang lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, yang berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);
- b. Misi Ketiga yaitu Mewujudkan Sumatera Utara yang Berbudaya, Religius Dalam Keberagaman, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan kepada kebijakankebijakan yang mampu menciptakan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai serta menyelesaikan dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya;



- c. Misi Keempat yaitu Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Partisipatif Dan Peduli Terhadap Proses Pembangunan, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi pemberdayaan masyarakat demi menciptakan masyarakat yang mandiri arah kebijakan pembangunan kedepannya diarahkan kepada : penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling); memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) serta melindungi kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah; peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi sebagai penunjang pembangunan; menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni dalam keberagamaan; mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan.

Adapun strategi Pemerintah Provinsi Sumatera dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (*strategy basic need*) dilaksanakan melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui urusan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, pengembangan sistem perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas. Peningkatan derajat kesejahteraan sosial masyarakat yang diarahkan pada kebijakan kualitas, perlindungan dan penanggulangan masalah sosial melalui :



1. Perhatian terhadap masalah kualitas perlindungan, pelayanan, dan jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem perlindungan sosial yang terpadu, yang mampu menjangkau seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Perbaiki kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan peran serta berbagai komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
5. Mengupayakan kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Sosial Daerah yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari Kebijakan Daerah, antara lain :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana dasar serta rumah layak huni
- b. Menurunkan angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan memberikan bantuan sosial dan penanganan PMKS
- c. Menurunkan jumlah kemiskinan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan dan bantuan dana usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin
- d. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, serta meningkatkan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender anak.



Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, meningkatkan peran perempuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial.

Adapun pembagian kewenangan bidang sosial antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1.1
Pembagian Kewenangan Bidang Sosial

No	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten
1	Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none">b. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT).c. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah provinsi.d. Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial.	<ul style="list-style-type: none">b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.c. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.d. Pemberdayaan sosial KAT.	<ul style="list-style-type: none">a. Penerbitan izin pengumpulan sumbanganb. dalam Daerah kabupaten/kota.c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.
2	Penanganan Warga Negara Migran korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none">a. Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi sampai ke Daerah provinsi asal.b. Pemulihan trauma korban tindak kekerasan (<i>trafficking</i>) dalam dan luar negeri.	<p>Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal.</p>	<p>Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/ kelurahan asal.</p>



3	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> .	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang memerlukan rehabilitasi pada panti.	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none">a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antara WNI dengan WNA.b. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.c. Pengelolaan data fakir miskin nasional.	<ul style="list-style-type: none">a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi	<ul style="list-style-type: none">a. Pemeliharaan anak-anak terlantar.b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.
5	Penanganan Bencana	<ul style="list-style-type: none">a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana nasional.b. Pembuatan model pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.	<ul style="list-style-type: none">a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota



6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional utama dan makam pahlawan nasional di dalam dan luar negeri.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
7	Sertifikasi dan Akreditasi	a. Pemberian setifikasi kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. b. Pemberian akreditasi kepada lembaga kesejahteraan sosial.		



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ditetapkan adalah untuk memberi batasan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari Misi yang telah digariskan. Tujuan ini merupakan suatu target yang ingin dicapai Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

- a. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat

Tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- d. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana.
- e. Meningkatkan mutu, keterjangkauan dan profesionalitas pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sasaran jangka pendek yang ingin dicapai adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diperkirakan dapat dicapai pada tahun 2019 adalah :



1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia OPD Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Mewujudkan standar hidup layak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatkan kualitas hidup layak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam upaya mencapai Visi dan Misi, maka Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan membuat Usulan Program sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan kondisi serta permasalahan yang dihadapi saat ini maka Dinas Sosial Daerah menyusun rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun prioritas kegiatan-kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Penyediaan jasa surat-menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat konsultasi dan kordinasi ke luar daerah
- Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah
- Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pengelolaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan meubelair
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin ASN di lingkungan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya, Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial masyarakat, Adapun Kegiatan–kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :



- Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
- Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
- Pembinaan/Monitoring Program Keluarga Harapan
- Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)

8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
- Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan

Adapun tujuan, sasaran program kegiatan Dinas Sosial Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



**Tabel 3.3.1
Tujuan, Sasaran Program Kegiatan Tahun 2019**

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Bidang Penganggung Jawab
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah ASN	
1	2	3	4	5	6	7	8
		URUSAN WAJIB					
		BIDANG SOSIAL					
		DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN					
Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia OPD Dinas Sosial Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Kab. Tapanuli Selatan	100	13	Sekretariat
Terpenuhinya benda pos	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat - menyurat SKPD (Benda Pos)	Kab. Tapanuli Selatan	160		Sekretariat
Terpenuhinya pembayaran rekening listrik, internet dan hosting website	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12		Sekretariat
Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional	Jaminan legalitas penggunaan kendaraan dinas	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional, roda 4 : 4 unit dan roda 2 : 4 unit (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12		Sekretariat
Terpenuhinya alat tulis kantor	Meningkatnya daya dukung kerja ASN	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12		Sekretariat
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan kantor	Meningkatnya daya dukung kerja ASN	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12		Sekretariat
Terpenuhinya komponen alat-alat listrik	Meningkatnya daya dukung kerja ASN	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat-alat listrik (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12		Sekretariat
Terpenuhinya alat-alat kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12		Sekretariat
Terpenuhinya surat kabar/ majalah dinas	Meningkatnya pengetahuan ASN	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar kantor/majalah dinas (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12		Sekretariat
Terpenuhinya makanan dan minuman rapat-rapat kantor	Meningkatnya pelayanan dinas	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor (Kotak)	Kab. Tapanuli Selatan	350		Sekretariat
Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dinas ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi dinas ke luar daerah dalam peningkatan pelayanan dinas	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH)	Kab. Tapanuli Selatan	180		Sekretariat



Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi dinas ke dalam daerah dalam peningkatan pelayanan dinas	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (OH)	Kab. Tapanuli Selatan	280		Sekretariat
Terpenuhinya pelayanan jasa administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 8 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang, pembantu pengurus barang pengguna 1 orang (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12		Sekretariat
Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia OPD Dinas Sosial Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	Kab. Tapanuli Selatan	100		Sekretariat
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya daya dukung kerja ASN	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	20		Sekretariat
Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Meningkatnya daya dukung kerja ASN	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	9		Sekretariat
Terpenuhinya meubelair kantor	Meningkatnya daya dukung kerja ASN	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	1		Sekretariat
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	Meningkatnya daya dukung kerja ASN	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12		Sekretariat
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Kondisi fisik kendaraan dinas operasional lebih baik	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12		Sekretariat
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor	Kondisi peralatan kantor lebih baik	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12		Sekretariat
Terpenuhinya perbaikan kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan dinas/ operasional yang diperbaiki lebih terpelihara	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	Kab. Tapanuli Selatan	1		Sekretariat
Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia OPD Dinas Sosial Daerah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	Kab. Tapanuli Selatan	100		Sekretariat



Terpenuhinya pakaian dinas dan tenun ASN	Meningkatnya disiplin ASN	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan tenun daerah (Stel)	Kab. Tapanuli Selatan	72		Sekretariat
Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia OPD Dinas Sosial Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	Kab. Tapanuli Selatan	20		Sekretariat
Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi ASN	Meningkatnya pengetahuan ASN	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	3		Sekretariat
Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia OPD Dinas Sosial Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Kab. Tapanuli Selatan	100		Sekretariat
Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi dinas	Laporan dokumen perencanaan dan evaluasi dinas	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA (Dokumen)	Kab. Tapanuli Selatan	6		Sekretariat
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat	Mewujudkan standar hidup layak bagi PMKS	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	Kab. Tapanuli Selatan	93.62	5	Bidang Penanganan Fakir Miskin
			Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit)		4		
			Sarana Sosial Panti Jompo (Unit)		4		
Terpenuhinya pelatihan keterampilan bagi PMKS	Meningkatnya keterampilan PMKS	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	5	Bidang Penanganan Fakir Miskin
		Pembinaan dan Peningkatan Kinerja tim PMKS dan Pemberian bantuan ke panti Sosial	Jumlah panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)	Kab. Tapanuli Selatan	-		
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat	Mewujudkan standar hidup layak bagi PMKS	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)	Kab. Tapanuli Selatan	39	14	Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial



			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)		93,62		
			Indeks Gini Rasio		<3,00		
Terpenuhinya pemberian bantuan bagi PMKS, penyandang disabilitas	Pemenuhan kebutuhan alat bantu untuk penyandang disabilitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	jumlah orang yang memperoleh bantuan bagi PMKS (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	20	4	Bidang Rehabilitasi Sosial
Terpenuhinya perencanaan, pemutakhiran data, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, pengaduan serta honorarium tim koordinasi bantuan sosial	Meningkatnya perencanaan, pemutakhiran data, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi serta penanganan bantuan sosial	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya- Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Meningkatnya perencanaan, pemutakhiran data, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, serta penanganan pengaduan bantuan sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai (%)	Kab. Tapanuli Selatan	73	5	Bidang Penanganan Fakir Miskin
Terpenuhinya monitoring keluarga penerima manfaat program keluarga harapan	Bantuan sosial tepat sasaran dan meningkatnya pemahaman tentang program keluarga harapan	Pembinaan/ monitoring Program Keluarga Harapan	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	60	5	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Terpenuhinya pelatihan taruna siaga bencana	Meningkatnya keterampilan taruna siaga bencana	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	45	5	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat	Meningkatkan kualitas hidup layak PMKS yang tertangani	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah karang taruna yang telah dibina	Kab. Tapanuli Selatan	3	7	Bidang Pemberdayaan Sosial
			Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)		66,67		
			Peresentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)		93,62		
			Persentase penyelesaian konflik (%)		83		



**Dinas Sosial Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan**

Terpenuhinya pelatihan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial dan pemberian bantuan fasilitasi usaha bagi organisasi masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial dan terfasilitasinya usaha organisasi masyarakat	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang mendapat bantuan fasilitasi usaha (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	150	7	Bidang Pemberdayaan Sosial
Terpenuhinya pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan, keperintisan masyarakat	Meningkatnya nilai kesetiakawanan sosial	Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keperintisan masyarakat (Kali)	Kab. Tapanuli Selatan	1	7	Bidang Pemberdayaan Sosial



Tabel 3.3.2
Rumusan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Tapanuli Selatan
Dinas Sosial Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB								
	BIDANG SOSIAL								
1 1 6 1 0 1	DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN				2,739,698,636	APBD			5,331,960,000
1 1 6 1 0 0 01 0 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Kab. Tapanuli Selatan	100	823,561,720	APBD		100	1,125,960,000
1 1 6 1 0 0 01 0 0 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat - menyurat SKPD (Benda Pos)	Kab. Tapanuli Selatan	160	960,000	APBD		160	960,000
1 1 6 1 0 0 01 0 0 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12	55,700,000	APBD		12	70,000,000



1	0	0	1	0	0	01	0	0	2	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 8 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang, pembantu pengurus barang pengguna 1 orang (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12	356,864,320	APBD	12	400,000,000
1	0	0	1	0	0	01	0	0		Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)	Kab. Tapanuli Selatan	33	0	APBD	33	-
1	0	0	1	0	0	01	0	0	1	Peringatan HUT Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pameran pembangunan OPD Dinas dalam rangka HUT Tapanuli Selatan (kali)	Kab. Tapanuli Selatan	1	0	APBD	1	-
1	0	0	1	0	0	01	0	0		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	Kab. Tapanuli Selatan	100	297,650,916	APBD	100	451,000,000
1	0	0	1	0	0	01	0	0	0	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD	1	30,000,000.00



1	0	0	1	0	0	01	0	0	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	20	42,000,000	APBD		20	60,000,000.00
1	0	0	1	0	0	01	0	0	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	9	66,900,000	APBD		5	80,000,000.00
1	0	0	1	0	0	01	0	0	1	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	1	13,880,916	APBD		6	80,000,000.00
1	0	0	1	0	0	01	0	0	1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Brankas 1 Unit, Lemari kabinet 1 unit, Filling kabinet 8 unit, laptop 12 unit, printer 7 unit, kursi kerja 26 unit, kamera EOS 1 unit, proyektor 1 unit, sound system 1 unit, TV LED 2 unit, kulkas 2 unit (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD		-	-
1	0	0	1	0	0	01	0	0	2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12	23,200,000	APBD		12	35,000,000.00
1	0	0	1	0	0	01	0	0	2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12	126,070,000	APBD		12	150,000,000.00
1	0	0	1	0	0	01	0	0	2	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12	0	APBD		12	-
1	0	0	1	0	0	01	0	0	2	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12	5,600,000	APBD		12	16,000,000.00
1	0	0	1	0	0	01	0	0	3	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	Kab. Tapanuli Selatan	1	20,000,000	APBD		1	-



1	0	0	1	0	0	01	0	0	0	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	Kab. Tapanuli Selatan	100	36,000,000	APBD		100	60,000,000
1	0	0	1	0	0	01	0	0	0	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan tenun daerah (Stel)	Kab. Tapanuli Selatan	72	36,000,000	APBD		72	40,000,000.00
1	0	0	1	0	0	01	0	0	0	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olah raga dan pakaian lapangan (Stel)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD		36	20,000,000.00
1	0	0	1	0	0	01	0	0	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	Kab. Tapanuli Selatan	20	21,600,000	APBD		20	30,000,000
1	0	0	1	0	0	01	0	0	0	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	3	21,600,000	APBD		4	30,000,000
1	0	0	1	0	0	01	0	0	0	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Kab. Tapanuli Selatan	100	62,386,000	APBD		100	100,000,000
1	0	0	1	0	0	01	0	0	0	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA (Dokumen)	Kab. Tapanuli Selatan	6	62,386,000	APBD		5	70,000,000
1	0	0	1	0	0	01	0	0	0	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas (Dokumen)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD		2	30,000,000



1	0	0	1	0	0	01	0	1		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	Kab. Tapanuli Selatan	93.62	351,000,000	APBD		93.95	555,000,000
											Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit)		4		APBD		4	
											Sarana Sosial Panti Jompo (Unit)		4		APBD		4	
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah peserta sosialisasi, petugas dan pendamping yang mengikuti sosialisasi (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD		-	185,000,000
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	300	351,000,000	APBD		10	80,000,000
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD		10	80,000,000
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah kepala keluarga yang menerima sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD		-	0
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS	Kab. Tapanuli	-	0	APBD		10	80,000,000



										kesejahteraan sosial	(orang)	Selatan							
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja tim PMKS dan Pemberian bantuan ke panti Sosial	Jumlah panti asuhan/jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD		8	130,000,000	
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)	Kab. Tapanuli Selatan	39	892,500,000	APBD		41	1,245,000,000	
											Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)		93.62		APBD		93.95		
											Indeks Gini Rasio		<3,00		APBD		<3,00		
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD		5	60,000,000.00	
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD		10	75,000,000.00	
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD		10	70,000,000.00	
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Pembentukan Pusat Informasi	Tersedianya pusat	Kab.	-	0	APBD		-		



	1	6		1	6		0	6	6	Penyandang Cacat dan Trauma Center	informasi penyandang cacat dan trauma center (unit)	Tapanuli Selatan						-
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	jumlah orang yang memperoleh bantuan bagi PMKS (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	20	159,500,000	APBD		20	-
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Meningkatnya perencanaan, pemutakhiran data, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, serta penanganan pengaduan bantuan sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai (%)	Kab. Tapanuli Selatan	73	350,000,000	APBD		75	450,000,000.00
1	0	0	1	0	0	01	0	1	1	Pembinaan/ monitoring Program Keluarga Harapan	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	60	236,000,000	APBD		60	430,000,000.00
1	0	0	1	0	0	01	0	1	1	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	45	147,000,000	APBD		45	160,000,000.00
1	0	0	1	0	0	01	0	1	7	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase penanganan anak terlantar (%)	Kab. Tapanuli Selatan	26	0	APBD		28	0
											Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		0,32		APBD		0,33	



1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Program pembinaan panti asuhan/ jompo		Kab. Tapanuli Selatan		0	APBD		210,000,000
											Sarana sosial panti asuhan (unit)		4		APBD		4
											Sarana sosial panti jompo (unit)		4		APBD		4
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan/jompo (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD		0
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Meningkatnya penyelenggaraan panti asuhan/jompo (%)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD		90
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD		20
1	0	0	1	0	0	01	0	1	0	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Jumlah peserta peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik bagi penghuni panti asuhan/jompo (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD		-
1	0	0	1	0	0	01	0	2	0	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)	Kab. Tapanuli Selatan	26	0	APBD		28
											Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)		93.62		APBD		93.95



1	0	0	1	0	0	01	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD	15	80,000,000.00
1	0	0	1	0	0	01	0	2	0	Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Tersedianya pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD	-	-
1	0	0	1	0	0	01	0	2	0	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayagunakan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD	-	-
1	0	0	1	0	0	01	0	2	0	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial dan penyusunan dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD	90	980,000,000.00
1	0	0	1	0	0	01	0	2	0	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah karang taruna yang telah dibina	Kab. Tapanuli Selatan	3	255,000,000	APBD	3	230,000,000
											Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)		66,67		APBD	68,33	
											Peresentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)		93.62		APBD	93.95	



Adapun alasan rancangan rencana pagu indikatif tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Untuk memenuhi target program sebesar 100%, pada kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan ini merupakan kegiatan penyediaan materai untuk administrasi perkantoran
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini memuat biaya listrik, biaya internet meliputi biaya internet wifi dan biaya hosting website dinas
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini memuat biaya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional roda 4 sebanyak 4 unit
 4. Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini memuat biaya kebutuhan terhadap alat tulis kantor dinas
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini memuat kebutuhan cetak blanko disposisi, kop surat, SPPD, amplop dinas, dan kop surat Bupati serta fotocopy untuk penggandaan dokumen administrasi
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini memuat kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan seperti fitting gantung, kabel listrik, lampu dan baterai jam
 7. Penyediaan peralatan rumah tangga
Kegiatan ini memuat untuk kebutuhan kebersihan kantor dinas
 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan ini memuat kebutuhan terhadap surat kabar selama 1 tahun



9. Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini memuat kebutuhan makan dan minum rapat dinas
 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan ini memuat biaya perjalanan dinas ke luar daerah
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kegiatan ini memuat biaya perjalanan dinas ke dalam daerah
 12. Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan ini memuat kebutuhan dana untuk THL sebanyak 8 orang, honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa, tim penerima hasil pekerjaan, bendahara pengeluaran, bendahara pembantu juru bayar, bendahara pembantu pembukuan, pejabat penatausahaan barang, dan pembantu pengurus barang pengguna
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Untuk memenuhi target program sebesar 100%, pada kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini memuat kebutuhan perlengkapan kantor seperti tiang besi umbul-umbul sebanyak 20 buah, dekorasi stand Hut Tapsel, dan sewa stand pameran Hut Tapsel
 2. Pengadaan peralatan gedung kantor
Kegiatan ini memuat kebutuhan peralatan kantor seperti computer desktop all in one 2 unit, laptop 3 unit, printer 2 unit, proyektor dan layar 1 unit
 3. Pengadaan meubelair
Kegiatan ini memuat kebutuhan meubelair seperti 1 set sofa dinas
 4. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Kegiatan ini memuat biaya pemeliharaan gedung kantor



5. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Kegiatan ini memuat asuransi kendaraan roda 4, pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas double garden dan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit
 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan ini memuat biaya pemeliharaan peralatan kantor sebanyak 20 unit
 7. Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional
Kegiatan ini memuat biaya rehab kendaraan double garden 1 unit
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Untuk meningkatkan disiplin ASN, pada kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kegiatan ini memuat kebutuhan pakaian dinas harian sebanyak 36 stel dan pakaian tenun sebanyak 36 stel
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Untuk meningkatkan kualitas ASN, pada kegiatan sebagai berikut :
1. Pendidikan dan pelatihan formal
Kegiatan ini memuat kebutuhan biaya kontribusi bimbingan teknis
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Untuk memenuhi target program yaitu 100%, pada kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan
Kegiatan ini memuat biaya lembur, cetak dokumen perencanaan, dan penggandaan dokumen perencanaan



- f. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Untuk memenuhi target capaian persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 93,62%, pada kegiatan sebagai berikut :

1. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Kegiatan ini memuat biaya kebutuhan pelatihan keterampilan bagi PMKS sebanyak 300 orang dan tali asih bagi tenaga kerja sosial kecamatan

- g. Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Untuk memenuhi target program yaitu persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial sebesar 39%, pada kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Kegiatan ini memuat kebutuhan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas seperti alat pendengaran, tongkat biasa, tongkat 3 kaki, dan tongkat 4 kaki, serta tali asih bagi pendamping asistensi lanjut usia, pendamping asistensi orang dengan kecacatan berat dan satuan bakti pekerja sosial

2. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Kegiatan ini memuat biaya perencanaan, pemutakhiran data, sosialisasi penyaluran bantuan, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan bantuan, serta honorarium tim koordinasi bantuan sosial

3. Pembinaan/ monitoring Program Keluarga Harapan

Kegiatan ini memuat kebutuhan monitoring penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan dan pembinaan pendamping program keluarga harapan

4. Pelatihan taruna siaga bencana

Kegiatan ini memuat kebutuhan pelatihan taruna siaga bencana sebanyak 45 orang



- h. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Untuk memenuhi target program yaitu jumlah karang taruna yang terbina sebesar 3 karang taruna, pada kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Kegiatan ini memuat kebutuhan pelatihan pertanian bagi PMKS di lokasi desa binaan sebanyak 150 orang
 2. Pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan
Kegiatan ini memuat kebutuhan peningkatan nilai-nilai kesetiakawanan yang dilakukan pada hari kesetiakawanan sosial



Tabel 3.3.3
INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)	66,67%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2. Terselenggaranya peningkatan prasarana dan sarana aparatur	100%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3. Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	4. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	20 Orang
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5. Terpenuhinya kewajiban pelaporan kinerja SKPD	100%
2.		a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93,62%
		b. Sarana sosial panti asuhan (unit)	4 Unit
		c. Sarana sosial panti jompo (unit)	4 Unit
		d. Persentase penanganan PMKS (%)	56%
	Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	6. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93,62%
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	7. Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)	39%
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	8. Jumlah karang taruna yang telah dibina	3 Karang Taruna



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam merencanakan kerja prioritas dan anggaran organisasi perangkat daerah. Adapun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :



**Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan**

Tujuan	sasaran	Indikat or sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			1	1	6		Urusan Sosial			2,683,956,000		4,112,935,000		4,301,893,000		4,382,914,000		4,538,978,000		4,588,908,000		21,925,628,000	
Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	ASN Dinas Sosial Daerah yang telah meningkatkan kualitas dan kinerjanya	1	1	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100%	-	100%	624,675,000	100%	612,292,000	100%	592,956,000	100%	607,705,000	100%	614,265,000	100%	3,051,893,000	
						1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat - menyurat SKPD (Benda Pos)		-	150 Benda Pos	1,000,000	750 Benda Pos	5,000,000									
						2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (Bulan)		-	12 Bulan	30,000,000	60 Bulan	150,000,000									
						6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional, roda 4 : 3 unit dan roda 2 : 1 unit (Bulan)		-	12 Bulan	7,000,000	60 Bulan	35,000,000									
						9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kantor dalam kondisi baik (Bulan)		-	12 Bulan	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	15,000,000	
						10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)		-	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	20,000,000	60 Bulan	110,000,000							
						11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (Bulan)		-	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	20,000,000	60 Bulan	105,000,000							



						1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat-alat listrik (Bulan)		-		12 Bulan	20,000,000	60 Bulan	100,000,000								
						1 4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (Bulan)		-		12 Bulan	20,000,000	60 Bulan	100,000,000								
						1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar kantor/majalah dinas (Bulan)		-		12 Bulan	20,000,000	60 Bulan	100,000,000								
						1 7	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor (Kotak)		-		1209 Kotak	30,000,000	1163 Kotak	30,000,000	1163 Kotak	30,000,000	1163 Kotak	30,000,000	1163 Kotak	30,000,000	5861 Kotak	150,000,000
						1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH)		-		300 OH	194,000,000	200 OH	193,650,000	250 OH	193,500,000	210 OH	193,200,000	190 OH	193,000,000	1150 OH	967,350,000
						1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (OH)		-		420 OH	82,675,000	200 OH	85,000,000	220 OH	80,000,000	230 OH	91,505,000	250 OH	98,265,000	1320 OH	437,445,000
						2 2	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 6 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang, pembantu pengurus barang pengguna 1 orang (%)		-		100%	150,000,000	100%	165,642,000	100%	151,456,000	100%	155,000,000	100%	155,000,000	100%	777,098,000
				0	0	0	7	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)			33%	35,076,000	33%	33,322,000	33%	31,656,000	33%	32,606,000	33%	32,965,000	33%	165,625,000



						17	Peringatan HUT Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pameran pembangunan OPD Dinas dalam rangka HUT Tapanuli Selatan (kali)				1 Kali	35,076,000	1 Kali	33,322,000	1 Kali	31,656,000	1 Kali	32,606,000	1 Kali	32,965,000	5 Kali	165,625,000
			1	1	6	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100%			100%	370,840,000	100%	315,221,000	100%	318,373,000	100%	320,273,000	100%	323,796,000	100%	1,648,503,000
						5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional (Unit)				3 Unit	60,000,000	4 Unit	70,000,000	2 Unit	50,000,000	3 Unit	60,000,000	2 Unit	50,000,000	14 Unit	290,000,000
						7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)				-	-	4 unit	40,000,000	2 Unit	20,000,000	3 unit	30,000,000	2 unit	30,000,000	11 Unit	100,000,000
						9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)				-	-	10 unit	50,221,000	6 Unit	23,373,000	8 unit	55,273,000	15 unit	50,000,000	39 unit	105,494,000
						10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor (unit)				-	-	10 unit	40,000,000	3 Unit	20,000,000	5 unit	40,000,000	3 Unit	20,000,000	21 Unit	120,000,000



						2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan tenun daerah (Stel)				40 stel PDH; 39 stel tenun daerah	35,076,000	39 stel PDH; 39 stel tenun daerah	16,000,000	39 stel PDH; 39 stel tenun daerah	16,000,000	39 stel PDH; 39 stel tenun daerah	17,000,000	39 stel PDH; 39 stel tenun daerah	17,000,000	196 stel PDH; 195 stel tenun daerah	85,076,000
						5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olah raga dan pakaian lapangan (Stel)				-	-	40 Stel pakaian olah raga dan 40 stel pakaian lapangan	17,634,000	40 Stel pakaian olah raga dan 40 stel pakaian lapangan	17,970,000	40 Stel pakaian olah raga dan 40 stel pakaian lapangan	17,310,000	40 Stel pakaian olah raga dan 40 stel pakaian lapangan	17,687,000	160 Stel pakaian olah raga dan 160 stel pakaian lapangan	70,601,000
			1	1	6	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	100%			5 orang	17,794,000	20 orang	15,753,000	20 orang	15,765,000	20 orang	18,735,000	20 orang	18,941,000	165 orang	86,988,000
						1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)				5 orang	17,794,000	20 orang	15,753,000	20 orang	15,765,000	20 orang	18,735,000	20 orang	18,941,000	165 orang	86,988,000
			1	1	6	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100%			100%	19,003,000	100%	15,613,000	100%	15,855,000	100%	16,035,000	100%	16,337,000	100%	82,843,000
						1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, laporan keuangan akhir tahun, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA, revisi renstra 2016-2021, ranwal renstra 2022-2026 (Dokumen)				6 Dokumen = Lakip, Laporan Keuangan, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA	19,003,000	6 Dokumen = Lakip, Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA, Revisi Renstra 2016-2021	9,263,000	5 Dokumen = Lakip, Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA	9,355,000	5 Dokumen = Lakip, Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA	9,235,000	6 Dokumen = Lakip, Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA, Rancangan awal Renstra 2022-2026	9,337,000	28 Dokumen	56,193,000



							4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas (Dokumen)					2 Dokumen = Laporan Keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas	6,350,000	2 Dokumen = Laporan Keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas	6,500,000	2 Dokumen = Laporan Keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas	6,800,000	2 Dokumen = Laporan Keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas	7,000,000	8 Dokumen	26,650,000	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat	Terwujudnya standard hidup layak bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan (%)	1	1	6	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	92.31%	92.64 %	364,056,000	92.97 %	394,604,000	93.29 %	647,307,000	93.62 %	652,626,000	93.95 %	695,532,000	94.28 %	703,512,000	94.28 %	3,093,581,000
							1	Peningkatan Kemampuan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah peserta sosialisasi, petugas dan pendamping yang mengikuti sosialisasi (orang)		100 orang	364,056,000	120 orang = 70 orang ; 50 orang	150,000,000	100 orang = 50 Orang ; 50 orang	150,000,000	110 orang = 60 Orang ; 50 orang	127,626,000	120 orang = 70 Orang ; 50 orang	150,000,000	130 orang = 80 Orang ; 50 orang	150,000,000	680 Orang	727,626,000
							2	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)				-	-	1 Pelatih an: 10 Orang	50,000,000	1 Pelatih an: 10 Orang	70,000,000	1 Pelatih an: 10 Orang	70,000,000	1 Pelatih an: 10 Orang	73,512,000	4 Pelatih an: 40 Orang	263,512,000
							3	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)				-	-	30 Kepala Keluarga	70,000,000	30 Kepala Keluarga	50,000,000	30 Kepala Keluarga	75,532,000	30 Kepala Keluarga	80,000,000	120 Kepala Keluarga	275,532,000



Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup layak PMKS yang tertangani	Persentase penanganan PMKS (%)	1	1	6	17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase penanganan anak terlantar (%)	-	-	22%	-	24%	326,597,000	26%	336,395,000	28%	349,851,000	30%	353,699,000	30%	1,366,542,000
							1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar	Tersedianya sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar (Unit)		-	-	-	1 Unit	166,395,000	1 Unit	150,000,000	1 Unit	150,000,000	3 Unit	466,395,000	
							3	Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar	Tersusunnya dokumen analisis permasalahan anak terlantar (dokumen)		-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	90,000,000	1 Dokumen	90,851,000	1 Dokumen	103,699,000	4 Dokumen	434,550,000	
							5	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah tenaga pembinaan anak terlantar pada pelatihan keterampilan (orang)		-	10 Orang	176,597,000	10 Orang	80,000,000	10 Orang	109,000,000	10 Orang	100,000,000	40 Orang	465,597,000	
Meningkatnya kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup layak PMKS yang tertangani	Persentase penanganan PMKS (%)	1	1	6	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penanganan para penyandang cacat dan trauma (%)	-	-	22%	-	24%	348,370,000	26%	358,821,000	28%	373,174,000	30%	377,279,000	30%	1,457,644,000
							1	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Tersusunnya dokumen penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Dokumen)		1 Dokumen	-	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	70,000,000	5 Dokumen	270,000,000
							2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Tersedianya sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma (unit)		-	-	-	1 Unit	80,000,000	1 Unit	113,174,000	1 Unit	100,000,000	3 Unit	293,174,000	
							3	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah peserta pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (orang)		-	-	15 Orang	128,370,000	15 Orang	88,821,000	15 Orang	100,000,000	15 Orang	107,279,000	60 Orang	424,470,000



							4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah peserta penyandang cacat dan eks trauma yang diberdayakan (orang)				-		15 Orang	80,000,000	15 Orang	50,000,000	15 Orang	50,000,000	15 Orang	50,000,000	60 Orang	230,000,000	
							5	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan keterampilan bagi tenaga pelatihan dan pendidik (orang)				-		10 Orang	70,000,000	12 Orang	70,000,000	15 Orang	50,000,000	15 Orang	50,000,000	52 Orang	240,000,000	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup layak PMKS yang tertangani	Persentase penanganan PMKS (%)	1	1	6	1	9	Program pembinaan panti asuhan/ jompo				-				261,277,000		269,116,000		279,880,000		282,959,000		1,093,232,000	
								Sarana sosial panti asuhan (unit)				-		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		20 Unit	
								Sarana sosial panti jompo (unit)				-		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		20 Unit	
							1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan/jompo (unit)				-			0	1 Unit	80,000,000	1 Unit	80,000,000	1 Unit	150,000,000	3 Unit	310,000,000	
							3	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Meningkatnya penyelenggaraan panti asuhan/jompo (%)				-			0	80%	30,000,000	90%	35,000,000	95%	40,000,000	95%	105,000,000	
							4	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)				-		30 Orang	150,000,000	30 Orang	80,000,000	30 Orang	90,000,000	30 Orang	52,959,000	120 orang	372,959,000	
							5	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Jumlah peserta peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik bagi penghuni panti asuhan/jompo (orang)				-		10 Orang	111,277,000	12 Orang	79,116,000	15 Orang	74,880,000	15 Orang	40,000,000	52 orang	305,273,000	



Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup layak PMKS yang tertangani	Persentase penanganan PMKS (%)	1	1	6	20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)	-	-	22%	-	24%	225,769,000	26%	232,542,000	28%	241,843,000	30%	244,504,000	30%	944,658,000
							1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (orang)					15 Orang	30,000,000	10 Orang	30,000,000	15 Orang	50,000,000	30 Orang	50,000,000	70 Orang	160,000,000
							2 Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Tersedianya pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial (unit)					1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	4 Unit	120,000,000
							4 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan (orang)					10 Orang	30,000,000	10 Orang	50,000,000	10 Orang	30,000,000	10 Orang	30,000,000	40 Orang	140,000,000
							5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)					70% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Aplikasi, 1 website, 1 Dokumen	135,769,000	80% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Dokumen	122,542,000	90% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Dokumen	131,843,000	100% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Dokumen	134,504,000	100% = 80 orang, 4 Dokumen, 1 Aplikasi, 1 Website, 4 Dokumen	524,658,000
								Jumlah yang mengikuti sosialisasi					20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang	
								Dokumen pemutakhiran data-data sosial					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	



						6	Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keperintisan masyarakat (Kali)				Tersele nggara nya hari kesetia kawana n sosial 20 Desember (1 Kali)	50,000,000	Tersele nggara nya hari kesetia kawana n sosial 20 Desember (1 Kali)	30,000,000	Tersele nggara nya hari kesetia kawana n sosial 20 Desember (1 Kali)	30,000,000	Tersele nggara nya hari kesetia kawana n sosial 20 Desember (1 Kali)	30,000,000	Tersele nggara nya hari kesetia kawana n sosial 20 Desember (1 Kali)	30,000,000	Tersele nggara nya hari kesetia kawana n sosial 20 Desember (5 Kali)	170,000,000
							TOTAL					-	4,112,935,000		4,301,893,000		4,382,914,000		4,538,978,000		4,588,908,000		21,925,628,000



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Periode 2016-2021, dalam Rencana Kerja Tahun 2019 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja Tahun 2019 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2019. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan pada umumnya.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sumber Dana APBN Tahun 2018

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Dinas Sosial Daerah Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Tapanuli Selatan
Sumber Dana APBN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Hasil Desk TA. 2018			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sangat Prioritas	Prioritas	APBD I	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sumber Dana APBN													
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Sosial				35,837,500,000				44,796,875,000	35,837,500,000			
	Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				3,937,500,000				4,921,875,000	3,937,500,000			



				04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin						3,937,500,000				4,921,875,000	3,937,500,000			
				1	Pembinaan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kabupaten Tapanuli Selatan	200 Kepala Keluarga	3,750,000,000	APBN	-	200 Kepala Keluarga	4,687,500,000	3,750,000,000	-	-	APBN		
				2	Pembinaan dan Pemberian Bantuan Bagi Keluarga Rentan	Jumlah terbina dan terberdayanya keluarga rentan	Kabupaten Tapanuli Selatan	30 Kepala Keluarga	187,500,000	APBN	-	30 Kepala Keluarga	234,375,000	187,500,000	-	-	APBN		
				16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				30,150,000,000				37,687,500,000	30,150,000,000					
				07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS				2,025,000,000				2,531,250,000	2,025,000,000					
				3	Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	Jumlah asistensi lanjut usia terlantar	Kabupaten Tapanuli Selatan	250 Orang	1,125,000,000	APBN	-	250 Orang	1,406,250,000	1,125,000,000	-	-	APBN		
				4	Asistensi Orang dengan Kecacatan Berat (ASODK Berat)	Jumlah asistensi terhadap orang dengan kecacatan berat	Kabupaten Tapanuli Selatan	200 Orang	900,000,000	APBN	-	200 Orang	1,125,000,000	900,000,000	-	-	APBN		
				12	Pembinaan/Monitoring Program Keluarga Harapan				28,125,000,000				35,156,250,000	28,125,000,000					
				5	Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah keluarga dalam pemberdayaan keluarga harapan	Kabupaten Tapanuli Selatan	8.000 Kepala Keluarga	26,250,000,000	APBN	-	8.000 Kepala Keluarga	32,812,500,000	26,250,000,000	-	-	APBN		



			6	Pendamping, Operator, dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pendamping, operator dan koordinator pada Program Keluarga Harapan	Kabupaten Tapanuli Selatan	35 Orang	1,875,000,000	APBN	-	35 Orang	2,343,750,000	1,875,000,000	-	-	APBN
			21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				1,750,000,000				2,187,500,000	1,750,000,000			
			03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat				1,750,000,000				2,187,500,000	1,750,000,000			
			7	Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin	Jumlah masyarakat miskin berkurang	Kabupaten Tapanuli Selatan	700 Kepala Keluarga	1,750,000,000	APBN	-	700 Kepala Keluarga	2,187,500,000	1,750,000,000	-	-	APBN
Total APBN								35,837,500,000				44,796,875,000	35,837,500,000			



Lampiran 2. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Dinas Sosial Daerah Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Tapanuli Selatan
Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Hasil Desk TA. 2018			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sangat Prioritas	Prioritas	APBD I	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara													
					9,270,000,000				11,587,500,000	9,270,000,000			
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Sosial												
15	Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				4,790,000,000				5,987,500,000	4,790,000,000			



				01	Peningkatan Kemampuan (<i>Capacity Building</i>) Pugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					300,000,000						375,000,000	300,000,000					
				1	Pemantapan bagi pekerja sosial masyarakat	Jumlah pekerja sosial masyarakat	Kabupaten Tapanuli Selatan	45 Orang	200,000,000	APBD I	-	45 Orang	250,000,000	200,000,000	-	APBD I						
				2	Pemantapan bagi TKSK	Jumlah TKSK	Kabupaten Tapanuli Selatan	14 Orang	100,000,000	APBD I	-	14 Orang	125,000,000	100,000,000	-	APBD I						
				04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin				4,490,000,000				5,612,500,000	4,490,000,000								
				3	Usaha ekonomi produktif	Jumlah orang yang menerima usaha ekonomi produktif untuk ASLUT	Kabupaten Tapanuli Selatan	120 Orang	240,000,000	APBD I	-	120 Orang	300,000,000	240,000,000	-	APBD I						
				4	Peningkatan kelompok usaha bersama (KUBE)	Jumlah kelompok usaha bersama	Kabupaten Tapanuli Selatan	100 Kelompok	2,000,000,000	APBD I	-	100 Kelompok	2,500,000,000	2,000,000,000	-	APBD I						



				5	Penguatan modal usaha bagi KUMKM dan kelompok usaha	Jumlah kepala keluarga yang memperoleh modal usaha untuk KUMKM dan kelompok usaha	Kabupaten Tapanuli Selatan	800 Kepala Keluarga	2,000,000,000	APBD I	-	800 Kepala Keluarga	2,500,000,000	2,000,000,000	-	APBD I
				6	Penyediaan bantuan pembiayaan perumahan MBR	Jumlah Kepala Keluarga yang memperoleh pembiayaan perumahan MBR	Kabupaten Tapanuli Selatan	60 Kepala Keluarga	250,000,000	APBD I	-	60 Kepala Keluarga	312,500,000	250,000,000	-	APBD I
				16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				3,240,000,000				4,050,000,000	3,240,000,000		
				07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS				490,000,000				612,500,000	490,000,000		
				7	Bantuan pengobatan untuk ASLUT	Jumlah ASLUT yang menerima pengobatan	Kabupaten Tapanuli Selatan	700 OH	350,000,000	APBD I	-	700 OH	437,500,000	350,000,000	-	APBD I
				8	Bantuan peralatan sekolah	Jumlah anak kurang mampu yang menerima bantuan peralatan sekolah	Kabupaten Tapanuli Selatan	140 Orang	140,000,000	APBD I	-	140 Orang	175,000,000	140,000,000	-	APBD I
				12	Pembinaan/Monitoring Program Keluarga Harapan				150,000,000				187,500,000	150,000,000		



			9	Pelatihan kapasitas peningkatan pendamping program keluarga harapan (PKH)	Jumlah Pendamping PKH	Kabupaten Tapanuli Selatan	35 Orang	150,000,000	APBD I	-	35 Orang	187,500,000	150,000,000	-	APBD I
			13	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)				2,600,000,000				3,250,000,000	2,600,000,000		
			10	Penyelenggaraan kampung siaga bencana	Jumlah kampung siaga yang berada di kecamatan	Kabupaten Tapanuli Selatan	12 Kecamatan	1,500,000,000	APBD I	-	12 Kecamatan	1,875,000,000	1,500,000,000	-	APBD I
			11	Bantuan pasca bencana	Jumlah kecamatan yang menerima bantuan pasca bencana	Kabupaten Tapanuli Selatan	12 Kecamatan	200,000,000	APBD I	-	12 Kecamatan	250,000,000	200,000,000	-	APBD I
			12	Bantuan pemulihan dan reintegrasi sosial korban bencana	Jumlah kepala keluarga yang mendapat bantuan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial korban bencana	Kabupaten Tapanuli Selatan	500 Kepala Keluarga	200,000,000	APBD I	-	500 Kepala Keluarga	250,000,000	200,000,000	-	APBD I
			13	Pengadaan perlengkapan Tagana	Jumlah Tagana yang memperoleh perlengkapan Tagana	Kabupaten Tapanuli Selatan	35 Orang	700,000,000	APBD I	-	35 Orang	875,000,000	700,000,000	-	APBD I
			18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma				390,000,000				487,500,000	390,000,000		
			03	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma				390,000,000				487,500,000	390,000,000		



			14	Pelatihan disabilitas sosial	Jumlah disabilitas sosial yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Tapanuli Selatan	100 Orang	390,000,000	APBD I	-	100 Orang	487,500,000	390,000,000	-	APBD I
			19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo				250,000,000	-	-		312,500,000	250,000,000		
			04	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo				250,000,000				312,500,000	250,000,000		
			15	Pembinaan panti asuhan dan panti jompo	Jumlah panti asuhan dan panti jompo yang terbina	Kabupaten Tapanuli Selatan	1 Tahun	250,000,000	APBD I	-	1 Tahun	312,500,000	250,000,000	-	APBD I
			21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				600,000,000				750,000,000	600,000,000		
			03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat				450,000,000				562,500,000	450,000,000		
			16	Pemantapan bagi organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS)	Jumlah organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	Kabupaten Tapanuli Selatan	20 Organisasi	200,000,000	APBD I	-	20 Organisasi	250,000,000	200,000,000	-	APBD I
			17	Penyuluhan SDM Karang Taruna	Jumlah SDM Karang Taruna	Kabupaten Tapanuli Selatan	80 Orang	200,000,000	APBD I	-	80 Orang	250,000,000	200,000,000	-	APBD I
			18	Peningkatan dan pemberdayaan lembaga konsultasi keluarga	Jumlah lembaga konsultasi keluarga	Kabupaten Tapanuli Selatan	1 Lembaga	50,000,000	APBD I	-	1 Lembaga	62,500,000	50,000,000	-	APBD I



				06	Pelestarian Nilai-Nilai Kesetiakawanan						150,000,000					187,500,000	150,000,000				
				19.	Penguatan karakter bangsa untuk penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pendahuluan bela negara generasi muda	Kabupaten Tapanuli Selatan	80 Orang	150,000,000	APBD I	-	80 Orang	187,500,000	150,000,000	-	APBD I					
Total APBD Provinsi																					
								9,270,000,000				11,587,500,000	9,270,000,000								



Lampiran 3. Usulan Program Kegiatan Sumber Dana APBN Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 Melalui Aplikasi Simlaras

Rumusan Usulan Program Kegiatan Sumber Dana APBN Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019
Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK	URUSAN PEMERINTAHAN	PEMETAAN TERHADAP NOMENKLATUR K/L			INPUT USULAN						
						KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM K/L	OUTPUT	NAMA USULAN PROYEK / OUTPUT	TARGET DAERAH	TARGET SATUAN	USULAN PAGU	PROVINSI	NOMOR SURAT BUPATI	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	LEMBAGA PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA YANG MELAKUKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL UNTUK PELAYANAN LK3	1	UNIT	450,000,000	SUMATERA UTARA		
2	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KORBAN BENCANA ALAM YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA ALAM	500	KEPALA KELUARGA	130,000,000	SUMATERA UTARA		
3	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KORBAN BENCANA SOSIAL YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA SOSIAL	150	KEPALA KELUARGA	130,000,000	SUMATERA UTARA		
4	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	MITIGASI DAN PENGUATAN PENYINTAS BENCANA ALAM	LOGISTIK BENCANA DAN BARANG PERLENGKAPAN	13	PAKET	2,000,000,000	SUMATERA UTARA		



5	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PENYANDANG DISABILITAS FISIK, MENTAL, SENSORIK DAN INTELEKTUAL YANG MENDAPAT ALAT BANTU	BANTUAN ALAT BANTU UNTUK PENYANDANG DISABILITAS	6	PAKET	210,875,000	SUMATERA UTARA		
6	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	KELOMPOK USAHA BERSAMA	100	KELOMPOK	2,000,000,000	SUMATERA UTARA		
7	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	E-WARUNG	100	UNIT	500,000,000	SUMATERA UTARA		
8	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PSKS LEMBAGA YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN	PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS SDM KARANG TARUNA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55	ORANG	308,980,000	SUMATERA UTARA		
9	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	TMPN/TMP/MPN YANG DIREHAB DAN DIPELIHARA	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	TMP	100,000,000	SUMATERA UTARA		
10	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	ANAK BALITA TERLANTAR, ANAK TERLANTAR/ ANAK JALANAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM, DAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	FASILITASI SAKTI PEKSOS DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN	4	ORANG	202,000,000	SUMATERA UTARA		



11	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	MITIGASI DAN PENGUATAN PENYINTAS BENCANA ALAM	PELATIHAN TARUNA SIAGA BENCANA	24	ORANG	240,000,000	SUMATERA UTARA		
12	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PENGUATAN LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU	ENGELOLAAN VERIFIKASI-VALIDASI BASIS DATA TERPADU	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	PENINGKATAN KUALITAS DATA-DATA SOSIAL	80	PERSEN	900,000,000.00	SUMATERA UTARA		
13	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PENGUATAN LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU	FASILITASI PENDAMPINGAN MASYARAKAT	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	SDM YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	HONORARIUM TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN	30	ORANG	1,160,000,000.00	SUMATERA UTARA		
14	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN	PENGUATAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DAN SUBSIDI TEPAT SASARAN	PENYALURAN BANTUAN TUNAI BERSYARAT SECARA NON TUNAI	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KELUARGA MISKIN YANG MENDAPAT BANTUAN TUNAI BERSYARAT	PROGRAM KELUARGA HARAPAN	10837	KPM	21,132,150,000	SUMATERA UTARA		
15	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN	PENGUATAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DAN SUBSIDI TEPAT SASARAN	PERLUASAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA	17972	KEPALA KELUARGA	2,336,360,000	SUMATERA UTARA		
16	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK	PENYEDIAAN AKSES HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU	FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS HUNIAN	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	BANTUAN TERHADAP RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	100	KEPALA KELUARGA	3,500,000,000	SUMATERA UTARA		



17	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK	PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI LAYAK	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SANITASI LAYAK	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	REHABILITASI SARANA LINGKUNGAN	100	SARANA	2.500.000,000	SUMATERA UTARA			
TOTAL												37.800.365,000				



Lampiran 4. Usulan Program Kegiatan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 Melalui Aplikasi Simlaras

Rumusan Usulan Program Kegiatan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara
Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019
Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK	URUSAN PEMERINTAHAN	PEMETAAN TERHADAP NOMENKLATUR K/L			INPUT USULAN						
						KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM K/L	OUTPUT	NAMA USULAN PROYEK / OUTPUT	TARGET DAERAH	TARGET SATUAN	USULAN PAGU	PROVINSI	NOMOR SURAT BUPATI	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	LEMBAGA PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA YANG MELAKUKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL UNTUK PELAYANAN LK3	1	UNIT	450,000,000	SUMATERA UTARA		
2	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KORBAN BENCANA ALAM YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA ALAM	500	KEPALA KELUARGA	130,000,000	SUMATERA UTARA		
3	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KORBAN BENCANA SOSIAL YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA SOSIAL	150	KEPALA KELUARGA	130,000,000	SUMATERA UTARA		
4	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	MITIGASI DAN PENGUATAN PENYINTAS BENCANA ALAM	LOGISTIK BENCANA DAN BARANG PERLENGKAPAN	13	PAKET	2,000,000,000	SUMATERA UTARA		



5	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PENYANDANG DISABILITAS FISIK, MENTAL, SENSORIK DAN INTELEKTUAL YANG MENDAPAT ALAT BANTU	BANTUAN ALAT BANTU UNTUK PENYANDANG DISABILITAS	6	PAKET	210.875.000	SUMATERA UTARA		
6	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	KELOMPOK USAHA BERSAMA	100	KELOMPOK	2.000.000.000	SUMATERA UTARA		
7	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	E-WARUNG	100	UNIT	500.000.000	SUMATERA UTARA		
8	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PSKS LEMBAGA YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN	PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS SDM KARANG TARUNA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55	ORANG	308.980.000	SUMATERA UTARA		
9	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	TMPN/TMP/MPN YANG DIREHAB DAN DIPELIHARA	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	TMP	100.000.000	SUMATERA UTARA		
10	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	ANAK BALITA TERLANTAR, ANAK TERLANTAR/ ANAK JALANAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM, DAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	FASILITASI SAKTI PEKSOS DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN	4	ORANG	202.000.000	SUMATERA UTARA		
11	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	MITIGASI DAN PENGUATAN PENYINTAS BENCANA ALAM	PELATIHAN TARUNA SIAGA BENCANA	24	ORANG	240.000.000	SUMATERA UTARA		



12	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK	PENYEDIAAN AKSES HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU	FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS HUNIAN	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	BANTUAN TERHADAP RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	100	KEPALA KELUARGA	3,500,000,000	SUMATERA UTARA			
13	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK	PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI LAYAK	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SANITASI LAYAK	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	REHABILITASI SARANA LINGKUNGAN	100	SARANA	2,500,000,000	SUMATERA UTARA			
TOTAL												12,271,855,000				



Lampiran 5. Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara OPD Dinas Sosial Daerah Tahun 2019 Sumber Dana APBD Kabupaten Melalui Aplikasi E-Planning Kabupaten Tapanuli Selatan

Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Sumber Dana APBD Kabupaten Tahun 2019

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/ Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif Tahun 2019(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN WAJIB				2,714,000,000
1.01	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,714,000,000
1.01.06	Sosial				2,714,000,000
1.01.06.01.00	Dinas Sosial				2,714,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100	809,556,136
1.01.06.1.01.06.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat - menyurat SKPD (Benda Pos)	Tapanuli Selatan	160	960,000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	49,947,000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional, roda 4 : 4 unit dan roda 2 : 5 unit (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	9,999,996
1.01.06.1.01.06.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	39,999,996



1.01.06.1.01.06.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetak dan pengandaan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	20,000,004
1.01.06.1.01.06.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen alat-alat listrik (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	5,000,004
1.01.06.1.01.06.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	6,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya surat kabar kantor/majalah dinas (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	19,200,000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor (Kotak)	Tapanuli Selatan	432	18,576,000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH)	Tapanuli Selatan	201	241,852,044
1.01.06.1.01.06.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (OH)	Tapanuli Selatan	256	64,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 8 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang	Tapanuli Selatan	12	334,021,092
1.01.06.1.01.06.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100	312,943,879
1.01.06.1.01.06.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	Tapanuli Selatan	-	0
1.01.06.1.01.06.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	Tapanuli Selatan	20	59,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	Tapanuli Selatan	9	80,000,001
1.01.06.1.01.06.01.00.02.10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor (unit)	Tapanuli Selatan	1	11,943,882
1.01.06.1.01.06.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Brankas 1 Unit, Lemari kabinet 1 unit, Filling kabinet 8 unit, laptop 12 unit, printer 7 unit, kursi kerja 26 unit, kamera EOS 1 unit, proyektor 1 unit, sound system 1 unit, TV LED 2 unit, kulkas 2 unit (unit)	Tapanuli Selatan	-	0
1.01.06.1.01.06.01.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	18,000,000



1.01.06.1.01.06.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	118,500,000
1.01.06.1.01.06.01.00.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	0
1.01.06.1.01.06.01.00.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	5,499,996
1.01.06.1.01.06.01.00.02.33	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	Tapanuli Selatan	1	20,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100	16,999,992
1.01.06.1.01.06.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan pakaian tenun (Stel)	Tapanuli Selatan	36	16,999,992
1.01.06.1.01.06.01.00.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian olah raga dan pakaian lapangan (Stel)	Tapanuli Selatan	-	0
1.01.06.1.01.06.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		75	14,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Tapanuli Selatan	2	14,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100	61,999,998
1.01.06.1.01.06.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, laporan keuangan akhir tahun, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA, (Dokumen)	Tapanuli Selatan	6	61,999,998
1.01.06.1.01.06.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		25	0
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		66.67	
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3	
1.01.06.1.01.06.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Terselenggaranya pameran pembangunan OPD Dinas dalam rangka HUT Tapanuli Selatan (kali)	Tapanuli Selatan	1	0



1.01.06.1.01.06.01.00.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit)		4	351,000,000
		Sarana Sosial Panti Jompo (Unit)		4	
		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		93.62	
1.01.06.1.01.06.01.00.15.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah peserta sosialisasi, petugas dan pendamping yang mengikuti sosialisasi (orang)	Tapanuli Selatan	110	0
1.01.06.1.01.06.01.00.15.02	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	Tapanuli Selatan	10	0
1.01.06.1.01.06.01.00.15.03	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	Tapanuli Selatan	30	0
1.01.06.1.01.06.01.00.15.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah kepala keluarga yang menerima sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	Tapanuli Selatan	30	0
1.01.06.1.01.06.01.00.15.05	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)	Tapanuli Selatan	300	351,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.15.06	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Tim PMKS dan Pemberian bantuan ke panti asuhan/ jompo	Jumlah panti asuhan/jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)	Tapanuli Selatan	8	0
1.01.06.1.01.06.01.00.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Indeks Gini Rasio		< 3,00	892,499,995
		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		93.62	
1.01.06.1.01.06.01.00.16.02	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)	Tapanuli Selatan	10	0
1.01.06.1.01.06.01.00.16.03	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)	Tapanuli Selatan	75	0



1.01.06.1.01.06.01.00.16.04	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal (orang)	Tapanuli Selatan	10	0
1.01.06.1.01.06.01.00.16.06	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center	Tersedianya pusat informasi penyandang cacat dan trauma center (unit)	Tapanuli Selatan	-	0
1.01.06.1.01.06.01.00.16.07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	jumlah orang yang memperoleh bantuan bagi PMKS (orang)	Tapanuli Selatan	20	159,500,000
1.01.06.1.01.06.01.00.16.09	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (%)	Tapanuli Selatan	72	350,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.16.12	Pembinaan/ Monitoring Program Keluarga Harapan	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	Tapanuli Selatan	60	235,999,980
1.01.06.1.01.06.01.00.16.13	Pelatihan Taruna Siaga bencana	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	Tapanuli Selatan	45	147,000,015
1.01.06.1.01.06.01.00.17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		93.62	0
		Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)		0	
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)		100	
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum		0.32	
1.01.06.1.01.06.01.00.17.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar	Tersedianya sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar (Unit)	Tapanuli Selatan	-	0
1.01.06.1.01.06.01.00.17.03	Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar	Tersusunnya dokumen analisis permasalahan anak terlantar (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	0
1.01.06.1.01.06.01.00.17.05	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah tenaga pembinaan anak terlantar pada pelatihan keterampilan (orang)	Tapanuli Selatan	10	0
1.01.06.1.01.06.01.00.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		93.62	0



1.01.06.1.01.06.01.00.18.01	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Tersusunnya dokumen penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1	0
1.01.06.1.01.06.01.00.18.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Tersedianya sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma (unit)	Tapanuli Selatan	-	0
1.01.06.1.01.06.01.00.18.03	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah peserta pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (orang)	Tapanuli Selatan	15	0
1.01.06.1.01.06.01.00.18.04	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah peserta penyandang cacat dan eks trauma yang diberdayakan (orang)	Tapanuli Selatan	15	0
1.01.06.1.01.06.01.00.18.05	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan keterampilan bagi tenaga pelatihan dan pendidik (orang)	Tapanuli Selatan	12	0
1.01.06.1.01.06.01.00.19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit)		4	0
		Sarana Sosial Panti Jompo (Unit)		4	
1.01.06.1.01.06.01.00.19.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan/jompo (unit)	Tapanuli Selatan	-	0
1.01.06.1.01.06.01.00.19.03	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Meningkatnya penyelenggaraan panti asuhan/jompo (%)	Tapanuli Selatan	-	0
1.01.06.1.01.06.01.00.19.04	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)	Tapanuli Selatan	30	0
1.01.06.1.01.06.01.00.19.05	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Jumlah peserta peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik bagi penghuni panti asuhan/jompo (orang)	Tapanuli Selatan	12	0
1.01.06.1.01.06.01.00.20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		93.62	0
1.01.06.1.01.06.01.00.20.01	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (orang)	Tapanuli Selatan	-	0
1.01.06.1.01.06.01.00.20.02	Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Tersedianya pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial (unit)	Tapanuli Selatan	-	0
1.01.06.1.01.06.01.00.20.04	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan (orang)	Tapanuli Selatan	10	0



1.01.06.1.01.06.01.00.20.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)	Tapanuli Selatan	80	0
1.01.06.1.01.06.01.00.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyelesaian Konflik (%)		83	255,000,000
		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		93.62	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Sosial Kemasyarakatan (%)		66.67	
1.01.06.1.01.06.01.00.21.02	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)	Tapanuli Selatan	6	0
1.01.06.1.01.06.01.00.21.03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang mendapat bantuan fasilitasi usaha (orang)	Tapanuli Selatan	150	225,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.21.05	Penanganan Konflik Sosial	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM TKSK dan penanganan kasus di LK3 (orang)	Tapanuli Selatan	30	0
1.01.06.1.01.06.01.00.21.06	Pelestarian Nilai-nilai Kesetiakawanan	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keperintisan masyarakat (Kali)	Tapanuli Selatan	1	30,000,000
	Jumlah Total (Rp)				2,714,000,000



Lampiran 6. Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran OPD Dinas Sosial Daerah Tahun 2019
Sumber Dana APBD Kabupaten Melalui Aplikasi E-Planning Kabupaten Tapanuli Selatan

Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPA)
Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Sumber Dana APBD Kabupaten Tahun 2019

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/ Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN WAJIB				2,739,698,636
1.01	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,739,698,636
1.01.06	Sosial				2,739,698,636
1.01.06.01.00	Dinas Sosial				2,739,698,636
1.01.06.1.01.06.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100	823,561,840
1.01.06.1.01.06.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat - menyurat SKPD (Benda Pos)	Tapanuli Selatan	160	960,000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	55,700,004
1.01.06.1.01.06.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional, roda 4 : 4 unit dan roda 2 : 5 unit (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	10,000,008
1.01.06.1.01.06.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	43,320,000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	20,000,508



1.01.06.1.01.06.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya komponen alat-alat listrik (Bulan)		12	5,002,404
1.01.06.1.01.06.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	6,002,508
1.01.06.1.01.06.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar kantor/majalah dinas (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	19,200,000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor (Kotak)	Tapanuli Selatan	432	18,550,000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tapanuli Selatan	201	240,912,000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tapanuli Selatan	256	47,050,080
1.01.06.1.01.06.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 8 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang	Tapanuli Selatan	12	356,864,328
1.01.06.1.01.06.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100	297,650,739
1.01.06.1.01.06.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	Tapanuli Selatan	20	42,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	Tapanuli Selatan	9	66,900,006
1.01.06.1.01.06.01.00.02.10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor (unit)	Tapanuli Selatan	1	13,880,713
1.01.06.1.01.06.01.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	23,200,008
1.01.06.1.01.06.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	126,070,008
1.01.06.1.01.06.01.00.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12	5,600,004
1.01.06.1.01.06.01.00.02.33	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	Tapanuli Selatan	1	20,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100	36,000,000



1.01.06.1.01.06.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan pakaian tenun (Stel)	Tapanuli Selatan	36	36,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		75	21,600,000
1.01.06.1.01.06.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Tapanuli Selatan	2	21,600,000
1.01.06.1.01.06.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100	62,386,002
1.01.06.1.01.06.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, laporan keuangan akhir tahun, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA, (Dokumen)	Tapanuli Selatan	6	62,386,002
1.01.06.1.01.06.01.00.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit)		4.00	351,000,000
		Sarana Sosial Panti Jompo (Unit)		4.00	
		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		93.62	
1.01.06.1.01.06.01.00.15.05	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)	Tapanuli Selatan	300	351,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan	Indeks Gini Rasio		< 3,00	892,500,055
		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		93.62	
1.01.06.1.01.06.01.00.16.07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	jumlah orang yang memperoleh bantuan bagi PMKS (orang)	Tapanuli Selatan	20	159,500,000



1.01.06.1.01.06.01.00.16.09	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (%)	Tapanuli Selatan	72	350,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.16.12	Pembinaan/ Monitoring Program Keluarga Harapan	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	Tapanuli Selatan	60	236,000,040
1.01.06.1.01.06.01.00.16.13	Pelatihan Taruna Siaga bencana	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	Tapanuli Selatan	45	147,000,015
1.01.06.1.01.06.01.00.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan	Persentase Penyelesaian Konflik (%)		83.00	255,000,000
		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		93.62	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Sosial Masyarakat (%)		66.67	
1.01.06.1.01.06.01.00.21.03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang mendapat bantuan fasilitasi usaha (orang)	Tapanuli Selatan	150	225,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.21.06	Pelestarian Nilai-nilai Kesetiakawanan	Terlestariannya nilai kepahlawanan, keberintisan masyarakat (Kali)	Tapanuli Selatan	1	30,000,000
	Jumlah Total (Rp)				2,739,698,636



Lampiran 7. Rekapitulasi Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2019 Melalui Aplikasi Sitarida.

Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Sumber Dana APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2019

		RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RKA SKPD 2.2	
		KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019								
Urusan Pemerintahan		1.01.06 - Sosial								
Organisasi		1.01.06.01.00 - Dinas Sosial Daerah Kabupaten								
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										
Kode Program 1	Kode Kegiatan 2	Uraian 3	Lokasi Kegiatan 4	Target Kinerja (Kuantitatif) 5	Jumlah Tahun N				Tahun N+1 10	
					Belanja Pegawai 6	Belanja Barang Jasa 7	Belanja Modal 8	Jumlah 9		
1.01.06.1.01.06.01.00.01		Program Pelayanan Administrasi			49.800.000,00	773.761.720,00	0,00	823.561.720,00	905.917.892,00	
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten	160	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	1.056.000,00	
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten	12	0,00	55.700.000,00	0,00	55.700.000,00	61.270.000,00	
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	



	1.01.06.1.01.06.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten	12	0,00	43.320.000,00	0,00	43.320.000,00	47.652.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan	Kabupaten	12	0,00	20.000.500,00	0,00	20.000.500,00	22.000.550,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	0,00	5.002.400,00	0,00	5.002.400,00	5.502.640,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah	Kabupaten	12	0,00	6.002.500,00	0,00	6.002.500,00	6.602.750,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Kabupaten	12	0,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	21.120.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten	350	0,00	18.550.000,00	0,00	18.550.000,00	20.405.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan	Kabupaten	180	0,00	240.912.000,00	0,00	240.912.000,00	265.003.200,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan	Kabupaten	280	0,00	47.050.000,00	0,00	47.050.000,00	51.755.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan	Kabupaten	12	49.800.000,00	307.064.320,00	0,00	356.864.320,00	392.550.752,00
1.01.06.1.01.06.01.00.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			0,00	216.870.000,00	80.780.916,00	297.650.916,00	327.416.007,60
	1.01.06.1.01.06.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung	Kabupaten	20	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	46.200.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung	Kabupaten	9	0,00	0,00	66.900.000,00	66.900.000,00	73.590.000,00



Kode	Kode	Uraian	Lokasi	Target Kinerja	Jumlah Tahun N				Tahun N+1
					Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.06.1.01.06.01.00.02.10	Pengadaan Meubelair	Kabupaten	1	0,00	0,00	13.880.916,00	13.880.916,00	15.269.007,60
	1.01.06.1.01.06.01.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Kabupaten	12	0,00	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00	25.520.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kabupaten	12	0,00	126.070.000,00	0,00	126.070.000,00	138.677.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kabupaten	12	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	6.160.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.02.33	Rehabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten	1	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.00.03		Program Peningkatan Disiplin			0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	39.600.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Kabupaten	72	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	39.600.000,00
1.01.06.1.01.06.01.00.05		Program Peningkatan Kapasitas			0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	23.760.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kabupaten	3	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	23.760.000,00
1.01.06.1.01.06.01.00.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			49.100.000,00	13.286.000,00	0,00	62.386.000,00	68.624.600,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tapanuli Selatan	6	49.100.000,00	13.286.000,00	0,00	62.386.000,00	68.624.600,00
1.01.06.1.01.06.01.00.15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			0,00	351.000.000,00	0,00	351.000.000,00	386.100.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.15.05	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Tapanuli Selatan	300	0,00	351.000.000,00	0,00	351.000.000,00	386.100.000,00



1.01.06.1.01.06.01.00.16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			146.400.000,00	746.100.000,00	0,00	892.500.000,00	981.750.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.16.07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Kabupaten Tapanuli Selatan	20	0,00	159.500.000,00	0,00	159.500.000,00	175.450.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.16.09	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Kabupaten Tapanuli Selatan	73	146.400.000,00	203.600.000,00	0,00	350.000.000,00	385.000.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.16.12	Pembinaan/ Monitoring Program	Kabupaten	60	0,00	236.000.000,00	0,00	236.000.000,00	259.600.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.16.13	Pelatihan Taruna Siaga bencana	Kabupaten	45	0,00	147.000.000,00	0,00	147.000.000,00	161.700.000,00
1.01.06.1.01.06.01.00.21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			0,00	255.000.000,00	0,00	255.000.000,00	280.500.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.21.03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kabupaten	150	0,00	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	247.500.000,00
	1.01.06.1.01.06.01.00.21.06	Pelestarian Nilai-nilai	Kabupaten	1	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	33.000.000,00
Jumlah Total					245.300.000,00	2.413.617.720,00	80.780.916,00	2.739.698.636,00	3.013.668.499,60



Lampiran 8. Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun
2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

REKAPITULASI USULAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

No.	Sumber Dana	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2019 (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	APBN	3	7	35.837.500.000	37.800.365.000
2.	APBD Provinsi Sumatera Utara	5	19	9.270.000.000	12.271.855.000
3.	APBD Kabupaten Tapanuli Selatan	10	35	4.149.062.720	2.739.698.636